

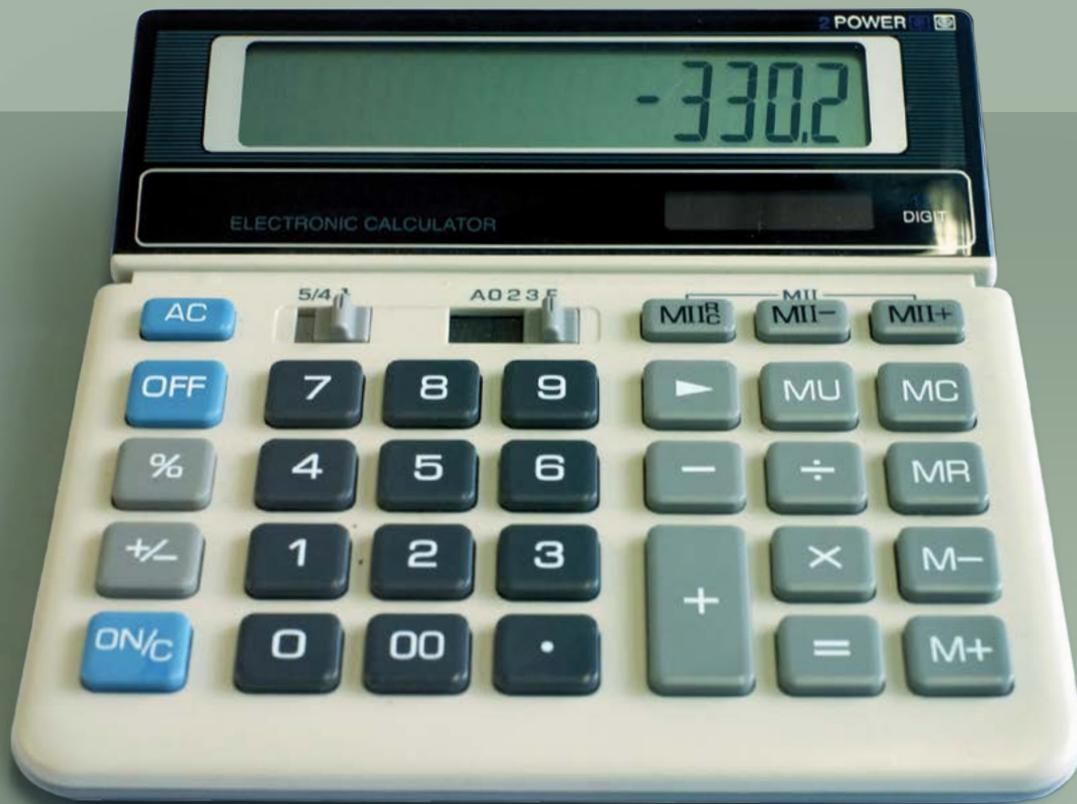


# MEDIAKEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL

## PEMBIAYAAN UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN

Utang bisa menjadi komponen pembiayaan untuk mempercepat pembangunan. Defisit anggaran bukan hanya dijaga pada batas aman, melainkan juga efektif untuk membiayai belanja yang produktif.



# Daftar Isi



Foto Cover  
Anas Nur Huda

## 5 DARI LAPANGAN BANTENG

## 6 EKSPOSUR

## 10 LINTAS PERISTIWA

**Diterbitkan oleh:** Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufrans Wira Sakti. **Pemimpin Redaksi:** Moh. Firdaus Rumbia. **Redaktur Pelaksana:** Dianita Suliastuti. **Dewan Redaksi:** Rizwan Pribhakti, Rezha S. Amran, Titi Susanti, Budi Sulisty, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Dendi Amrin, Sri Moeji S., Diah Sarkorini, Adya Asmara Muda, Hadi Suroono, Ali Ridho, Agung Sudaryono, R. Mukiwihando, Muchamad Ardani. **Tim Redaksi:** Irma Kesuma Dewi, Iin Kurniati, Farida Rosadi, Pradany Hayyu, Dwinanda Ardhi, Bagus Wijaya, Danik Setyowati, Abdul Aziz, Resha Aditya Pratama, Rostamaji, Joko Triharyanto, Adik Tejo Waskito, Cahya Setiawan, Arif Nur Rokhman, Panji Pradana Putra, Ferdian Jati Permana, Sugeng Wistriono, Muchamad Ardani, Adhi Kurniawan, Pandu Putra Wiratama, Syahrul Ramadhan, Muhammad Fabhi Riendi, Hesti Sulistiowati, Nur Muhlisin. **Redaktur Foto:** Anas Nur Huda, Tino Adi Prabowo, Gathot Subroto, Fransiscus Edy Santoso, Eko Priharyanto, Andi Al Hakim, Hadi Suroono, Muhammad Fath Kathin, Arif Setiyawan, Putra Lusumo Bekti, Adhi Kurniawan, Nur Iman. **Desain Grafis dan Layout:** Dewi Rusmayanti, Wardah Adina, Arlindo Briyan Santoso, Victorianus M.I. Bimo. **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepiantasnya.

## FIGUR

32 Mengayomi dan Membumi

## EKONOMI TERKINI

36 Berkaca dari Realisasi, Berharap pada Prospek Ekonomi

## KOLOM EKONOM

40 Daya Saing Listrik, EBT, dan Efisiensi APBN 2017

## GENERASI EMAS

44 Cita-Cita Tak Terhalang Kursi Roda

## OPINI

46 Menggagas Sharing Economy Antar BLU

## REGULASI

48 Cegah Kecurangan Transfer Pricing, Pemerintah Wajibkan Dokumen Tambahan

## INSPIRASI

50 Suka Duka dari Kandang Ayam

## RENGUNGAN

52 Membangun Kepercayaan Diri Buah Hati

## FILLM

53 La La Land: Reinkarnasi Musikal Modern

## JALAN-JALAN

54 Menikmati Kedamaian di Tangkahan

## SELEBRITI

56 Konsep ZAPFIN bagi PNS

## LAPORAN UTAMA

13 Mengelola Utang Sebagai Instrumen Pembiayaan

16 Infografis

18 Kebijakan Ekspansif yang Produktif

21 Utang Produktif Berdampak Positif

23 Pembiayaan Penuh Manfaat

## REPORTASE

25 Menkeu Resmikan Gedung Marie Muhammad

26 Sinergi Visi untuk Negeri

## WAWANCARA

27 Tahun 2050 Listrik Bisa Gratis

## POTRET KANTOR

30 Siap Wujudkan Desentralisasi



MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.

MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh melalui



App Store



Google Play

# GRATIFIKASI TIDAK SELALU GRATIS LAPORKAN !!!

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 /PMK.01/2015

**Gratifikasi** adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilaksanakan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

**Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)** adalah unit pelaksanaan program pengendalian Gratifikasi.

Setiap Pelapor yang melaporkan Gratifikasi kepada KPK melalui UPG pada unit kerja Pelapor dilindungi hak dan kewajibannya



UNIT  
PENGENDALI  
GRATIFIKASI  
KOORDINATOR KEMENTERIAN KEUANGAN

## Untuk Pembangunan yang Produktif

Setiap hari Selasa, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan lelang rutin untuk Surat Berharga Negara (SBN). Seringkali pelelangan SBN tersebut mengalami *oversubscribed*, pembelinya bisa ratusan bahkan ribuan. Hal ini menunjukkan kepercayaan dan minat masyarakat yang tinggi. Untuk saat ini, pasar SBN adalah satu-satunya sumber pembiayaan yang paling andal.

\*\*\*  
Saat ini, APBN 2017 telah ditetapkan dengan kebijakan fiskal yang ekspansif dan terarah. Konsekuensi yang dimiliki yaitu belanja yang ditargetkan dalam APBN lebih besar dari dari pendapatannya. Efek selanjutnya yaitu terjadi adalah defisit. Lalu, bagaimana agar defisit ini dapat ditutup?

Utang adalah salah satu jawabannya. Dengan berutang, pemerintah dapat melaksanakan program-program yang sudah dicanangkan, yaitu program jangka menengah dan program tahunan. Tentunya defisit yang terarah mampu mendukung kegiatan produktif untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing. Hal tersebut juga tak lepas dari pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat dan berkesinambungan, antara lain mengendalikan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Idealnya, dengan adanya pendapatan negara yang lebih tinggi, pemerintah akan dapat meningkatkan belanja yang bertujuan menurunkan kesenjangan di Indonesia. Kita dapat meningkatkan belanja untuk masyarakat miskin dan mengurangi kesenjangan. Saat ini,

rasio pajak dan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih terbilang rendah, terutama apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Apabila kedua hal tersebut bisa lebih meningkat, maka defisit anggaran dapat dihindari.

Terkait penggunaan utang, tentunya utang kita manfaatkan untuk kegiatan yang produktif. Penggunaannya untuk membiayai belanja-belanja yang dimasukkan di Kementerian/Lembaga (K/L), yang sebelumnya ditetapkan bersama dengan DPR. APBN kita saja telah mengunci belanja untuk pendidikan 20 persen dan kesehatan 5 persen. Selain itu, belanja produktif lainnya digunakan untuk belanja infrastruktur. Ini artinya, kita berinvestasi untuk masa depan.

### Kementerian Keuangan Republik Indonesia @KemenkeuRI

Klasifikasi baru pembiayaan utang dalam #APBN2017 dibagi 2, yaitu penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar keuangan & penarikan pinjaman. Pinjaman berasal dari kreditur baik multilateral, bilateral maupun komersil di dalam negeri maupun di luar negeri #SadarAPBN #KemenkeuTepercaya. Sampaikan optimisme temanKeu terkait pembiayaan utang untuk kegiatan produktif dalam #APBN2017 #OpiniAnda

**B A Y U**  
@bayudhiyan  
Sebagai masyarakat saya berharap utang dikelola untuk meningkatkan pembangunan, bukan untuk kegiatan konsumtif.

**fauzen 38**  
@fauzenakip38  
Utang produktif hrs digunakan untuk infrastruktur wilayah timur, pembiayaan UMKM dan industri kreatif.

**DAVID SATURDAY**  
@dewatouejoh  
Infrastruktur dalam negeri sedang dikerjakan Semoga banyak Investor Asing dan Lokal Mau Bekerja Sama



tweet

## Kemenkeu Peduli Aceh

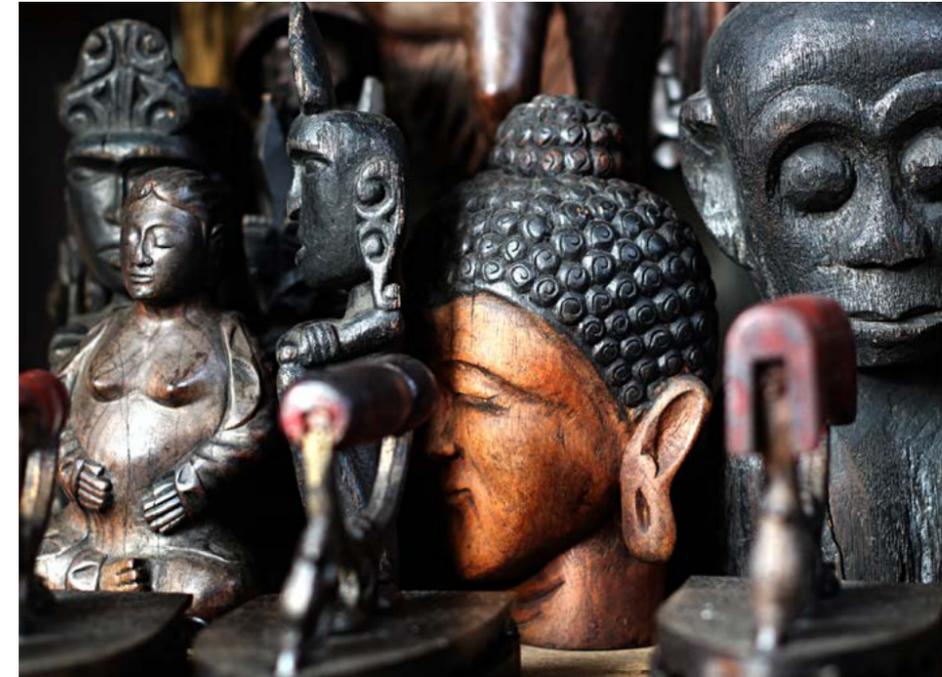
---

**P**ara pelajar SMP Negeri 2 Meureudu di Pidie Jaya, Nangroe Aceh Darussalam berlomba untuk berfoto bersama dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Kamis (5/1). Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menyerahkan sumbangan pegawai Kementerian Keuangan dari tingkat pusat dan kantor wilayah di seluruh Indonesia untuk masyarakat korban gempa bumi di sana. Sekitar Rp3,3 miliar dana sumbangan yang terkumpul akan disalurkan dalam bentuk bantuan logistik dan rekonstruksi infrastruktur pendidikan dan ibadah di Pidie Jaya.

---

**Foto**  
Anas Nur Huda

---



## Jalan Surabaya di Jakarta

Foto  
Taufik Rahman

**P**asar loak di Jalan Surabaya, kawasan Menteng adalah pasar legendaris di tengah ibu kota Jakarta. Di sana kita bisa membeli barang-barang antik seperti lampu, telepon, karya seni pahat, kaset, hingga piringan hitam lagu-lagu lawas. Meskipun hanya berdiri di sepanjang jalan yang tidak terlalu luas, pasar ini memiliki pelanggannya sendiri, termasuk turis mancanegara.



23/12

### Menkeu Resmikan LMAN

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meresmikan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, pada Jumat (23/12). LMAN ditujukan untuk mendukung optimalisasi manajemen aset negara guna meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial, sekaligus menggali potensi *return on assets*, PNBPN yang berasal dari BMN. Menurutnya, setiap tahunnya selalu ada pembangunan baru dan menambah daftar aset milik Indonesia. Namun, aset tersebut belum bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk menambah manfaatnya bagi masyarakat. Untuk itu, ke depannya LMAN diharapkan dapat menanamkan sikap mental baru untuk meningkatkan nilai ekonomis sebuah aset.

Teks  
Biro KLI

Foto  
Anas



31/12

Teks  
Biro KLI

Foto  
Langgeng

### Menkeu Lakukan Rapat Akhir Tahun Melalui Video Conference

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan rapat koordinasi akhir tahun 2016 melalui *video conference* dengan para Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia di Aula Mezzanine gedung Djuanda, Jakarta pada Sabtu (31/12). Menanggapi laporan yang disampaikan, Menkeu mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di Kementerian Keuangan yang telah menjaga dan mengelola keuangan dan kekayaan negara dengan baik. Lebih lanjut, Menkeu juga mengapresiasi atas sinergi yang dilakukan pada laporan yang disampaikan.

05/01

Teks  
Biro KLI

Foto  
Anas

### Menkeu Sampaikan Bantuan Untuk Korban Gempa Aceh

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati secara simbolis menyampaikan bantuan kepada korban gempa bumi di Pidie Jaya, Aceh pada Kamis (05/01). Bantuan kemanusiaan tersebut dilaksanakan dengan dana yang diperoleh dari sumbangan pegawai Kementerian Keuangan dari tingkat pusat dan kantor wilayah di seluruh Indonesia, yang hingga 5 Januari 2017 terkumpul Rp3.390.151.746 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah). Dana tersebut akan disalurkan dalam bentuk bantuan logistik dan rekonstruksi infrastruktur pendidikan dan ibadah di Pidie Jaya, Aceh.



16/01

Teks  
Biro KLI

Foto  
Langgeng

### Kemenkeu - TNI Tandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Panglima TNI menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja sama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kemenkeu dengan TNI di Aula Gedung Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta pada Senin (16/01). Menkeu sendiri menyampaikan dukungannya ke TNI, karena menurutnya, TNI memiliki peran yang sangat penting. "Kemampuan untuk bisa mempengaruhi masyarakat untuk memiliki sikap karakter. Mestinya, TNI kalau kemana pun, *nanya, Pak udah bayar pajak atau belum?*" kata Menkeu.



16/01

Teks  
Biro KLI

Foto  
Wulan

### Menkeu Umumkan Seleksi Dewan Komisiner OJK 2017-2022

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan pada awak media mengenai Seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisiner OJK periode 2017-2022 di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I, Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta pada Senin (16/01). Dalam kesempatan ini Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa seleksi ini diselenggarakan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik. "Pansel bertugas memilih dan menetapkan calon anggota Dewan Komisiner, untuk disampaikan kepada Presiden melalui seleksi transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik," jelas Menkeu.

Agenda

2/02 Peresmian Pusat Logistik Berikat PT PINDAD di Bandung.

/02 Workshop ICOFR dan Workshop Wasbun dilaksanakan di Jakarta dengan melibatkan K/L lain.

15-17/02 Penandatanganan Customs Cooperation Arrangement dengan Hongkong Customs (Bilateral) di Hongkong.



18/01

## Bangun Infrastruktur Tanpa Kendala Anggaran

Teks  
Biro KLIFoto  
Agus Tri

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri peresmian kantor PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) pada Rabu (18/01) di Jakarta. Dalam pidatonya, Menkeu menyebut bahwa PT SMI, sebagai BUMN di bawah Kementerian Keuangan, lahir dengan harapan dapat membiayai pembangunan infrastruktur negara secara luas tanpa terkendala anggaran. "PT SMI bisa menjadi hadiah republik ini. Ketika diciptakan dan menjalankan fungsi, ingatlah akan tata kelola yang baik demi kemajuan infrastruktur negara ini," kata Menkeu.



20/01

Teks  
Biro KLIFoto  
Langgeng

## Defisit Anggran Bisa Dihindari, Asal....

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan kuliah umum kepada para mahasiswa Universitas Udayana, Denpasar, Bali pada Jumat (20/01). Dalam paparannya, Menkeu menjelaskan bahwa rasio pajak dan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia, saat ini masih terbilang rendah. Terutama apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Menkeu menyebutkan bahwa jika kedua hal tersebut bisa lebih meningkat, maka defisit anggaran dapat dihindari. "Kepatuhan pajak di Indonesia masih terbilang rendah, yaitu di 62,3 persen. Kalau tingkat kepatuhan mencapai 80 persen saja penerimaan perpajakan pasti bisa meningkat," katanya.

19/01

Teks  
Biro KLIFoto  
Hilman

## Responsif terhadap Tantangan Perekonomian 2017

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Kuliah Umum dalam rangka Hari Ulang Tahun ke 47 harian Media Indonesia di Studio Metro TV pada Kamis (19/01). Menkeu menyatakan bahwa dalam satu dekade, pertumbuhan ekonomi Indonesia mempunyai kemampuan daya tahan stabil di tengah gejolak perekonomian dunia dan merupakan suatu aset tersendiri. Namun demikian, menurut Menkeu meski ekonomi tumbuh tinggi, disparitas antardaerah di Indonesia masih terjadi.



## Mengelola Utang Sebagai Instrumen Pembiayaan

Pemerintah masih membutuhkan utang untuk pembangunan di dalam negeri.

Foto  
Jodie  
Umbara

Pemerintahan Presiden Jokowi berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan fiskal yang ekspansif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Dalam kebijakan yang ekspansif, kebutuhan belanja pembangunan menjadi prioritas. Saat ini, pendapatan negara belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja, sehingga pemerintah masih mengambil kebijakan utang. Pengelolaan utang sebagai bagian dari pembiayaan di Indonesia antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Di dalam aturan tersebut, defisit anggaran dibatasi tiga

persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan rasio utang Indonesia terhadap PDB saat ini, yang berkisar 27,7 persen, telah mengalami penurunan dari 2016 sebesar 32 persen. "Jika dibandingkan penduduk Indonesia perkepala menanggung utang USD997. Sementara Amerika Serikat yang dikatakan negara kuat dan kaya, penduduknya perkepala menanggung utang hingga USD85.000. Jadi kita masih baik," kata Menkeu dalam kuliah umum bertema Prospek Ekonomi Indonesia 2017 dalam acara HUT Media Indonesia ke-47, Kamis (19/1) di Jakarta.

Lebih lanjut, Menkeu mengatakan bahwa pemerintah masih membutuhkan utang untuk pembangunan di dalam negeri. Apalagi saat ini, penerimaan pajak masih belum maksimal. Dalam postur APBN 2017, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp1.750,3 triliun dan belanja negara Rp2.080,5 triliun. Dari situ terdapat defisit sekitar Rp330,2 triliun. Pada saat yang sama, belanja negara tak bisa ditunda. “Membangun sekolah, infrastruktur, gaji Polisi, TNI kita *kan enggak* bisa tunda. Maka defisit ini tidak bisa dihindari,” ujar Menkeu. Meskipun begitu, Menkeu menekankan bahwa pemerintah menjaga azas pengelolaan dana defisit APBN agar tetap efektif dan produktif.

Dalam wawancara dengan Media Keuangan, Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Rudi Purwono menjelaskan bahwa dalam teori ilmu ekonomi, utang tidak dilarang. “Dalam kasus Indonesia, yang menjadi catatan adalah pembiayaan sebaiknya diarahkan untuk pembangunan infrastruktur,” kata Rudi di Surabaya, Jumat (13/1). Keberadaan batasan defisit sebesar tiga persen terhadap PDB bisa menjadi rambu pengelolaan pembiayaan. Porsi utang juga harus diperhatikan agar tidak menabrak undang-undang. Di samping itu, pemerintah dipandang perlu secara terarah memperhatikan sumber utang. “Lebih baik utang ke dalam negeri dan mengurangi utang ke lembaga donor. Kedaulatan negara menjadi tidak tergadaikan,” lanjutnya.

**Prioritas Utang dalam negeri**  
Apa yang disampaikan Rudi sejalan dengan kebijakan pengelolaan utang yang dilakukan pemerintah. Melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu), pemerintah mengoptimalkan sumber pendanaan utang dari dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap. Dari data DJPPR, utang pemerintah pusat hingga Desember 2016 senilai Rp3.444,82 triliun. Statistik utang luar negeri Indonesia, yang meliputi utang luar negeri pemerintah pusat, Bank Indonesia, dan swasta sebesar Rp4.411,51 triliun. Sementara itu, statistik utang sektor publik Indonesia yang meliputi utang pemerintah pusat, Bank Indonesia, dan BUMN sebesar Rp6948,60 triliun.

Dirjen PPR Robert Pakpahan dalam kesempatan perbincangan dengan Media Keuangan menerangkan bahwa melihat utang hanya dari segi nominalnya saat ini sudah bukan menjadi paradigma yang pas. Negara berkembang seperti Indonesia memerlukan utang untuk mendorong produktivitas pembangunan. “Utang tidak masalah jika manfaatnya lebih tinggi dibandingkan dengan bunganya,” kata kata Robert di ruang kerjanya, Selasa (10/1).

Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, rasio utang Indonesia masih relatif aman. “Malaysia, Turki, Filipina, dan India yang rasio utangnya jauh di atas kita,” ujar Robert. Di samping itu, utang pemerintah pusat saat ini

juga memiliki usia jatuh tempo yang *manageable* dengan rata-rata jangka waktu sembilan tahun.

Strategi pembiayaan yang dijalankan oleh DJPPR merupakan penjabaran dari arahan Presiden Jokowi untuk mengimplementasikan kebijakan fiskal ekspansif. DJPPR terus melakukan pengembangan instrumen utang dan perluasan basis investor utang agar diperoleh fleksibilitas dalam memilih sumber utang yang lebih sesuai kebutuhan dengan biaya minimal dan risiko yang terkendali. Sejak pertama kali diluncurkan 14 tahun silam, instrumen utang Surat Berharga Negara (SBN) terus mengalami perkembangan yang baik.

Dua instrumen SBN, yaitu Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) telah berkembang, bahkan pasar sekunder di mana SUN dan SBSN juga diperjualbelikan menjadi hidup. Saat ini, SBN sebagai instrumen andalan pembiayaan pemerintah memiliki pembeli utama di pasar (*market*). “Oleh karena itu, memelihara hubungan dengan pasar menjadi urusan penting, di samping juga perlunya menjaga fundamental perekonomian,” kata Robert.

Sejak diluncurkan, SBN terus mengalami diversifikasi. Dari segi pasar, SBN memiliki pembeli di dalam dan luar negeri. Pada 2017, proporsi target penjualan SBN dalam negeri sebesar 83 persen dan pembeli dari luar negeri adalah 17 persen. Sementara total penjualan dari surat berharga tahun ini diperkirakan bisa mencapai Rp684 triliun.

SUN dan SBSN—atau yang juga dikenal dengan sukuk—terus

**"Tidak banyak negara yang memiliki sukuk dalam valuta asing dan mana-jemennya baik. Pengelolaan sukuk valas kita saat ini diapresiasi di pasar global."**

**Robert Pakpahan Dirjen PPR**

mengalami diversifikasi jenis. Kedua instrumen tersebut juga diluncurkan dalam mata uang selain rupiah, antara lain euro dan dolar Amerika Serikat. Pada 2017, porsi utang yang ditargetkan dari penjualan sukuk mencapai 29 persen. Hal ini menjadi indikator penerimaan instrumen ini di pasar. Di samping itu, terus membesarnya potensi sukuk juga mendapatkan apresiasi dari dunia internasional. “Tidak banyak negara yang memiliki sukuk dalam valuta asing (valas) dan manajemennya baik. Pengelolaan sukuk valas kita saat ini diapresiasi di pasar global,” kata Robert.

Dalam delapan tahun terakhir, total penerbitan sukuk negara mencapai Rp538 triliun dengan nilai nominal *outstanding* mencapai sekitar Rp391 triliun. Tahun ini pemerintah menargetkan penerbitan sukuk berbasis proyek sebesar Rp16,76 triliun. Potensi pengembangan sukuk berbasis proyek masih sangat besar. Jumlah sukuk berbasis proyek saat ini masih relatif minim, dengan nilai kurang dari Rp10 triliun. Beberapa sukuk berbasis proyek misalnya proyek jalur ganda kereta lintas Cirebon–Kroya Segmen II dan pembangunan jalur ganda paket A Manggarai–Jatinegara.

Dalam sudut pandang pengamat, Rudi mengapresiasi pengelolaan utang yang dilakukan oleh DJPPR. Ke depan, dia menyarankan agar pemerintah mempertahankan pengeluaran obligasi jangka panjang dengan tenor lebih dari sepuluh tahun. “Keluarkan produk yang *yield*-nya bisa bersaing dan perhatikan sukuk

valas. Dalam kondisi ekonomi dalam negeri yang relatif baik, maka ini adalah momentum yang baik untuk melakukan diversifikasi pasar lebih luas lagi,” ujar Rudi. Di samping itu, dia juga menyambut baik kebijakan pemerintah melakukan *front loading* atau mengambil utang di awal tahun. “Strategi *front loading* sangat baik. Catatan saya jangan sampai ada dana (pembiayaan) mahal yang dipilih pemerintah,” lanjut Rudi lagi.

**Etika bermitra**

Dalam menjual SBN, pemerintah melibatkan beberapa pihak, antara lain *dealer* utama. Pada 30 Desember 2016, pemerintah mengeluarkan revisi peraturan menteri keuangan (PMK) Nomor 234 Tahun 2016 tentang *Dealer* Utama sebagai perubahan atas PMK Nomor 134 Tahun 2013. Dalam PMK tersebut, Kementerian Keuangan menegaskan etika bermitra dalam kerja sama dengan penjual utama SUN.

Revisi PMK, sebagaimana dituangkan dalam siaran pers bertanggal 11 Januari 2017, adalah langkah tindak lanjut atas pelaksanaan evaluasi *dealer* utama serta untuk meningkatkan efektivitas *dealer* utama berdasarkan tata kelola yang baik. Dalam pasal 7A PMK revisi diatur bahwa *dealer* utama wajib menjaga hubungan kemitraan dengan Pemerintah Indonesia berlandaskan asas profesionalitas, integritas, penghindaran benturan kepentingan, dan memperhatikan kepentingan Indonesia. Kemenkeu dapat mencabut penunjukan jika *dealer* utama tidak melaksanakan kewajiban itu.

Yang juga menjadi materi

perubahan lain adalah Kemenkeu berwenang menerima atau menolak permohonan bank atau perusahaan efek yang ingin menjadi *dealer* utama sebagaimana diatur pada pasal 5. Beberapa pertimbangannya adalah pengalaman bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan efektivitas penerapan sistem *dealer* utama. Kemenkeu ingin menjaga hubungan mutualisme yang juga menjadi etika di banyak negara.

**Belajar dari Argentina**

Apresiasi terhadap pengelolaan utang juga datang dari Wakil Presiden Periode 2009–2014, Boediono. Dalam sebuah kesempatan wawancara di Jakarta akhir tahun lalu, Boediono menilai rasio utang pemerintah saat ini sudah *manageable* dan menjadi pencapaian yang baik. “Jika persentase ini dibandingkan dengan negara lain sudah oke *lah*. Masalahnya bagaimana rasio ini kita pertahankan dan jaga jangan sampai ada letupan-letupan ke depan,” katanya.

Yang menjadi catatan Boediono adalah utang-utang di luar utang pemerintah pusat, seperti utang BUMN dan utang pemerintah daerah. “Masalahnya, utang-utang di luar utang pemerintah itu besar, seperti utang BUMN dan nanti ke depan—yang sekarang belum terlihat menjadi masalah—adalah utang pemerintah daerah. Kemungkinan suatu saat nanti ini bisa membesar dan menimbulkan masalah seperti di Argentina dulu,” kata Boediono. Masalah di sana, krisis bukan dari pemerintah pusat, tapi ada puluhan provinsi yang utangnya besar dan tidak dipantau.

Boediono melihat potensi hal yang sama terjadi di Indonesia memang masih jauh. Pemerintah daerah saat ini masih dalam batas-batas yang sangat aman dalam pengelolaan utangnya, demikian juga BUMN. “Yang paling sulit itu memonitor utang swasta,” kata Boediono.

Boediono berharap pemerintah terus melakukan proyeksi profil utang yang jatuh tempo. “Jangan sampai pada suatu tahun kita kaget karena harus membayar jumlah yang besar. Sejak beberapa tahun sebelumnya kita sudah bisa menghitung (utang jatuh tempo) ini,” ujarnya.

**Teks** Dwinanda Ardhi

# Pembiayaan

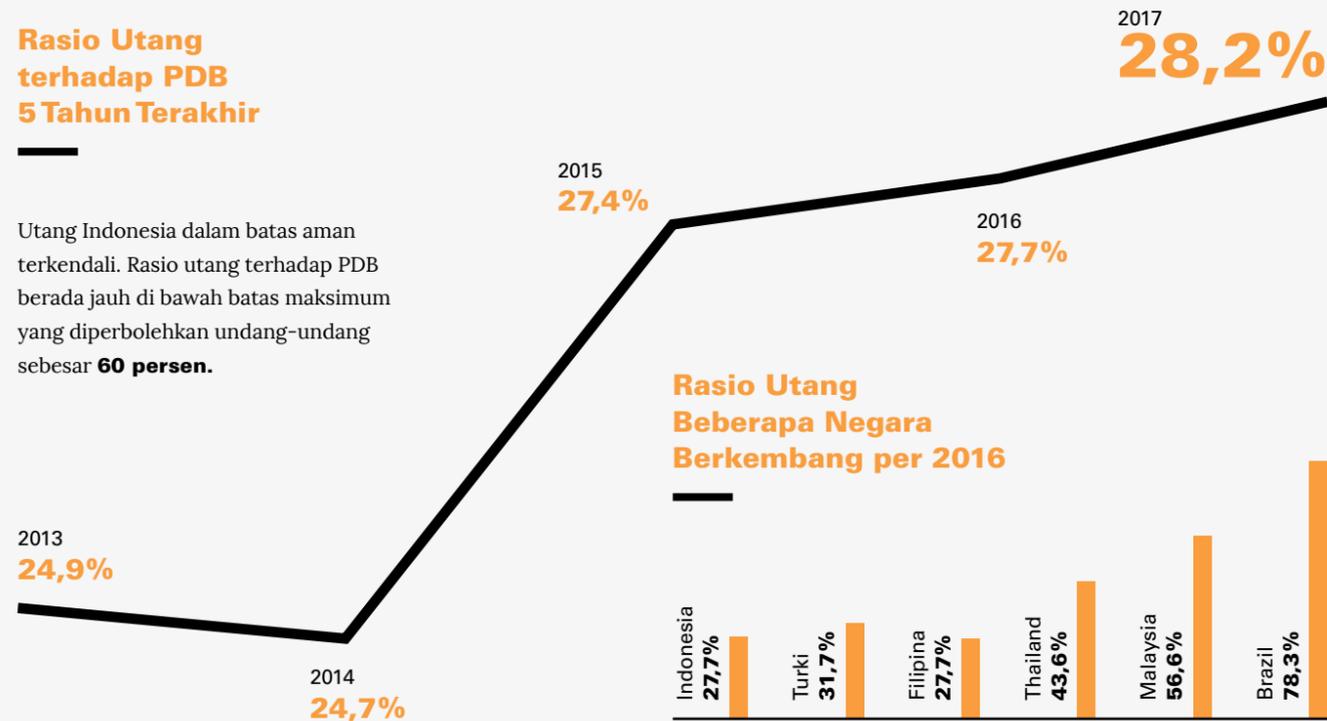
## Sokong Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Sumber:  
Buku Informasi APBN TA 2017, DJA  
Profi Utang Pemerintah Pusat, DJPPR

Pembiayaan merupakan konsekuensi atas pilihan pemerintah untuk memprioritaskan percepatan pembangunan nasional melalui kebijakan fiskal ekspansif. Hal ini diikuti dengan pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat dan berkesinambungan. Pembiayaan melalui utang dikendalikan dalam batas yang wajar dan terjaga. Sementara itu, strategi pembiayaan investasi dilakukan guna mendorong sektor prioritas sebagai penggerak kegiatan ekonomi masyarakat.

### Rasio Utang terhadap PDB 5 Tahun Terakhir

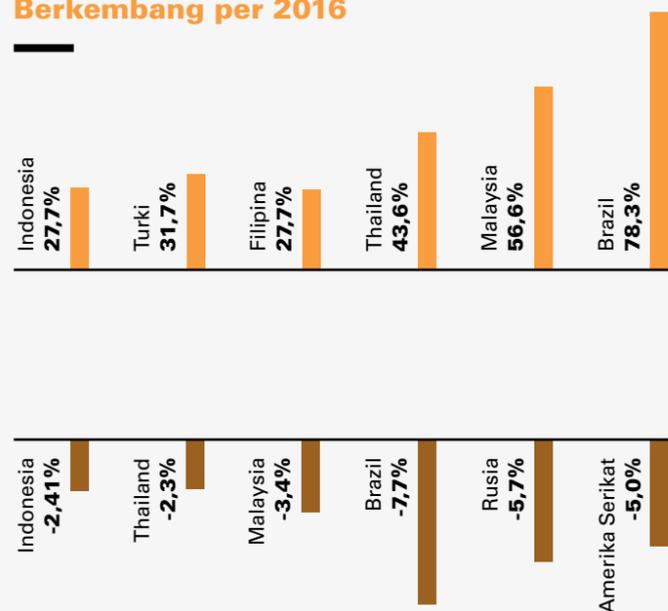
Utang Indonesia dalam batas aman terkendali. Rasio utang terhadap PDB berada jauh di bawah batas maksimum yang diperbolehkan undang-undang sebesar **60 persen**.



### Defisit Terhadap PDB Beberapa Negara

UU mengamankan defisit anggaran di bawah **3 persen** dari PDB. Defisit Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan beberapa negara lain.

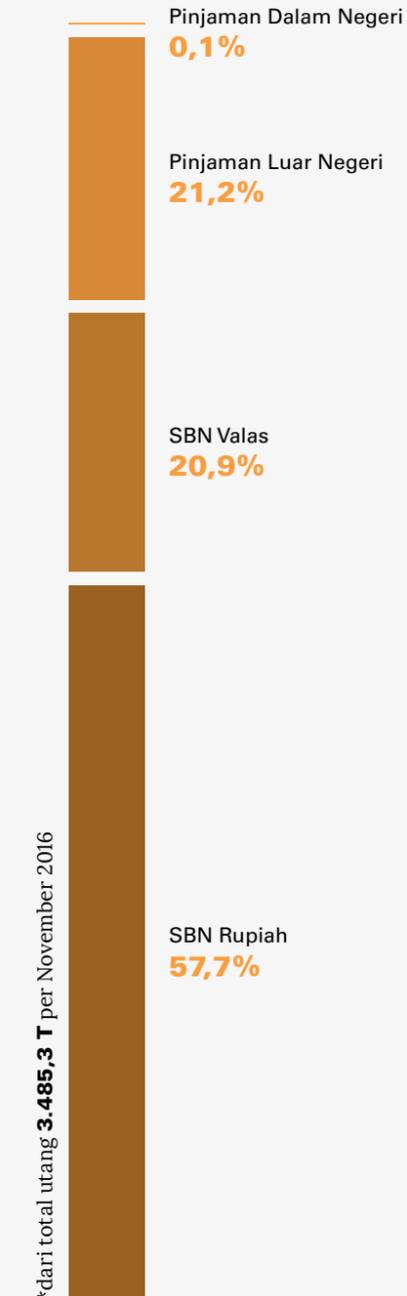
### Rasio Utang Beberapa Negara Berkembang per 2016



### Prinsip Kebijakan Pengelolaan Utang Negara

- Efisiensi Biaya
- Keseimbangan Utang Dalam Negeri vs Luar Negeri
- Pembiayaan Investasi
- Kehati-hatian

### Kepemilikan Utang Pemerintah Pusat\*



### Posisi Utang 2017



### Pembiayaan Infrastruktur

#### PMN

Pada PT. PII: pembangunan PLTU, proyek air minum, dan jalan tol **Rp1,0T**

Pada PT. SMI: proyek Palapa Ring Paket Tengah dan Timur serta jalan tol Trans Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar **Rp2,0T**

Pada PT. SMF: Program satu juta rumah **Rp1,0T**

#### Dana FLPP

Pembiayaan perumahan KPR bagi MBR **Rp9,7T**

### Pembiayaan Investasi

Investasi dari Lembaga Keuangan Internasional **Rp2,0T**

Investasi kepada BUMN **Rp2,0T**

Investasi kepada Lembaga/Badan Lain **Rp6,8T**

Investasi kepada BLU **Rp34,7T**

#### LMAN

Pemenuhan kebutuhan lahan untuk beberapa proyek **Rp9,7T**

# Kebijakan Ekspansif yang Produktif

**K**ebijakan fiskal yang ekspansif dan terarah telah menjadi kesepakatan politik antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di dalam Undang-Undang APBN 2017. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah selaku pihak eksekutif yang menjalankan Undang-Undang melaksanakan kebijakan pengelolaan ekonomi secara keseluruhan melalui belanja negara. Namun demikian, penerimaan negara yang masih terbatas menimbulkan defisit yang harus dibiayai melalui pembiayaan utang. Yang perlu

menjadi perhatian, defisit tersebut harus diarahkan kepada sektor yang produktif agar tidak menjadi beban di masa depan.

Menurut Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Scenaider Siahaan, pengelolaan utang merupakan bagian dari

kebijakan fiskal yang telah ditetapkan secara bersama oleh pemerintah dan DPR. Dalam jangka pendek, tujuan pengelolaan utang adalah memastikan tersedianya dana untuk menutup defisit dan membayar kewajiban pokok utang secara tepat waktu, biaya yang efisien, dan risiko yang terkendali (*manageable*).

Tol Laut Bali.

Foto  
Tino Adi  
Prabowo

Ia menambahkan bahwa belanja produktif penting dilakukan mengingat potensi dari bonus demografi yang akan diperoleh oleh Indonesia di masa depan. Untuk itu, persiapan infrastruktur baik fisik maupun nonfisik penting dilakukan. Scenaider meyakini bahwa utang pemerintah dapat digunakan sebagai daya ungkit (*leverage*) dalam mempercepat pembangunan. Dengan utang, pemerintah mampu mendorong peningkatan dan pemerataan akses pendidikan dan kesehatan yang bisa menjadi kesempatan bagi masyarakat kelas bawah untuk meningkatkan pendapatan perkapitanya melalui pekerjaan yang lebih layak.

Bila dibandingkan dengan negara pembanding (*peer*) lainnya, Indonesia termasuk negara yang mampu menekan rasio utang terhadap pendapatan domestik brutonya (PDB) dengan tingkat pengelolaan yang lebih baik. Tercatat selama satu dekade terakhir, rasio utang terhadap PDB sudah jauh menurun. Pasca krisis ekonomi 1998-1999, rasio utang pemerintah terhadap PDB tercatat sekitar 80 persen, namun pada akhir 2016, rasio tersebut turun di bawah level 30 persen.

## Evolusi Pembiayaan dalam APBN

Pembiayaan APBN melalui utang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang lazim dilakukan oleh suatu negara. Pembiayaan utang sendiri tidak terlepas dari adanya ketidakseimbangan dari sisi belanja dan penerimaan dalam APBN. Sebelum tahun 2000 (APBN 1969 - 2000), kebijakan fiskal yang diterapkan di Indonesia masih menganut prinsip anggaran berimbang dengan format laporan *T-account*. Dalam kebijakan anggaran tersebut, utang yang disebut sebagai penerimaan pembiayaan dianggap sebagai bagian dalam pendapatan negara.

Pasca krisis ekonomi 1997/1998, APBN memperoleh dampak akumulasi utang yang cukup besar. Namun, saat itu, APBN masih memperoleh dukungan pendapatan dari sebagian penerimaan *asset-recovery* Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk melunasi utang/obligasi rekapnya. Di sisi lain, pemerintah juga tengah berupaya mencari sumber pembiayaan alternatif selain dari pinjaman.

Mulai tahun 2000, format APBN diubah menjadi *I-account*. Hal tersebut memungkinkan defisit anggaran tercermin secara eksplisit dan jelas dalam postur APBN.

Pemerintah juga melakukan perubahan kebijakan dari segi sumber pembiayaan yang mulai difokuskan pada sumber pembiayaan domestik. Hal tersebut terlihat dari sumber pembiayaan defisit APBN yang semakin didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN). “Pada akhirnya *shifting* dari pinjaman tadi karena limitnya semakin kecil, kemudian pelan-pelan diganti menjadi Surat Berharga Negara,” terang Scenaider.

## Pengelolaan Risiko Pembiayaan

Pengelolaan pembiayaan dilakukan dengan menjaga indikator risiko pada tingkat yang aman dan *managable*. Menurut Scenaider, pengelolaan utang sudah dimulai dari tahap perencanaan. Menurutnya, penyebaran jatuh tempo dari utang perlu dibuat lebih merata. Pada akhir 2016, nilai *average time to maturity* dari utang diperkirakan sekitar 9,02 tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa utang pemerintah memiliki jatuh tempo pembayaran rata-rata selama 9 tahun, sehingga dapat menurunkan risiko *refinancing* secara bertahap. Selain itu, risiko *refinancing* dapat diturunkan dengan melakukan penukaran SBN (*debt switch*) dan pembelian kembali SBN yang beredar (*buyback*). Selama periode 2011-2016, tercatat SBN yang telah dilakukan *debt switch* sebesar Rp23,92 triliun dan *buyback* SBN untuk periode yang sama sebesar Rp9,44 triliun.

Kedua, menurutnya, risiko yang perlu dikendalikan dalam pengelolaan pembiayaan adalah risiko kurs. “Kita kan menerbitkan valuta asing. Valas ini kalau terjadi depresiasi (atas rupiah) juga bisa menambah utang membengkak seketika,” ujarnya. Untuk mengatasi itu, menurutnya, perlu pengelolaan SBN dengan mengatur komposisi denominasi SBN dalam valas sebesar 20-25 persen dan dalam Rupiah sebesar 75-80 persen. Dengan demikian, lambat laun, rasio utang valas terhadap rupiah akan semakin turun. Manfaatnya, bila suatu saat terjadi depresiasi rupiah terhadap valas, besaran nominal utang tidak akan terlalu membengkak karena sudah didominasi oleh rupiah.

Sementara itu, yang ketiga adalah adanya risiko bunga. Negara sebagai debitur dapat melakukan pinjaman dengan opsi bunga yang tetap (*fixed rate*) ataupun bunga mengambang (*variable rate*). Meskipun bunga mengambang dapat memberikan tingkat bunga yang rendah, tetapi juga memiliki risiko pembayaran

# Utang Produktif Berdampak Positif

bunga yang tinggi pada saat suku bunga acuan tinggi. Untuk mengurangi risiko tersebut, pemerintah telah menerbitkan sebagian besar SBN-nya dengan tingkat suku bunga yang tetap.

## Strategi Pembiayaan APBN 2017

Dalam APBN 2017, kebutuhan pembiayaan terhitung sebesar Rp647,83 triliun. Nilai tersebut terdiri dari pembiayaan defisit yang ditarget sebesar Rp330,17 triliun, pembiayaan nonutang sebesar Rp54,52 triliun, pembiayaan utang jatuh tempo sebesar Rp230,14 triliun, pembiayaan *cash buyback* sebesar Rp3 triliun, dan pembiayaan untuk *cash management* dari SPN sebesar Rp30 triliun. Untuk itu, pemerintah melalui DJPPR Kemenkeu memiliki peran untuk memenuhi kebutuhan tersebut dari dua sumber pembiayaan, yaitu penerbitan SBN sebesar Rp597,03 triliun (92 persen) dan penarikan pinjaman sebesar Rp50,80 triliun (8 persen).

Melalui sumber penerbitan SBN, pemerintah melakukan tiga macam strategi pembiayaan, yaitu penerbitan SBN domestik, penerbitan SBN valas, dan pengelolaan portofolio SBN. Untuk tahun 2017, Scenaider menjelaskan bahwa kebijakan pengelolaan SBN masih akan sama dengan tahun sebelumnya. SBN akan diterbitkan dengan porsi sekitar 20–25 persen dalam valas dan sekitar 75–80 persen dalam rupiah. Penerbitan SBN domestik akan dilakukan melalui lelang sebesar Rp347,33 triliun dan melalui penerbitan nonlelang melalui SBN Ritel ataupun *private placement* sebesar Rp40 triliun. Sementara itu, penerbitan SBN valas direncanakan akan dilakukan dalam mata uang USD, EUR, JPY, atau mata uang lainnya dengan mempertimbangkan pengelolaan risiko dan cadangan devisa. Terakhir, strategi pengelolaan portofolio SBN dilakukan dengan kebijakan *debt switching* atau *cash buyback*.

Menurut Scenaider, dalam APBN 2017, risiko *refinancing* akan sedikit mengalami perubahan karena *average time to maturity* akan semakin diperpendek. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pasar uang dan pendalaman pasar agar kurva imbal hasil (*yield curve*) untuk level utang jatuh tempo yang pendek juga semakin lebih baik. Selain itu, dari segi biaya juga dapat berdampak menjadi lebih rendah. Pemerintah

juga memiliki fleksibilitas untuk merealisasikan sebagian kebutuhan pembiayaan di awal 2017 dengan mempertimbangkan kondisi pasar, kondisi kas negara, dan kebutuhan pembiayaan utang pada awal tahun anggaran. Strateginya, tambah Scenaider, dengan melakukan *front loading* 60 persen di semester I dan 40 persen di semester II. “Kita terbitkan lebih banyak semester I dengan harapan kita memiliki *cash buffer* yang memadai kalau nanti semester II terjadi pengaruh yang lebih agak jelek kita sudah punya *buffer*-nya,” tambahnya.

Sumber pembiayaan yang kedua adalah melalui penarikan pinjaman, baik yang berasal dari Pinjaman Dalam Negeri maupun dari Pinjaman Luar Negeri. APBN 2017 ditargetkan akan menarik pinjaman dari dalam negeri sebesar Rp2,5 triliun dengan fokus penggunaan untuk peningkatan industri pertahanan dalam negeri. Sedangkan pinjaman dari luar negeri dengan biaya yang lebih kompetitif ditargetkan sebesar Rp48,3 triliun dengan fokus penggunaan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah dan proyek yang memiliki *multiplier effect*.

## Menimbang manfaat dan risiko

Sementara itu, pengamat ekonomi yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Lembaga Penjamin Simpanan, Destry Damayanti, menggambarkan bahwa komitmen pemerintah untuk menjaga defisit di bawah 3 persen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara merupakan hal yang positif. Menurutnya, anggaran defisit bukanlah hal yang tidak bagus, dengan syarat utang untuk menutupi defisit tersebut digunakan untuk kegiatan yang produktif. “Jadi defisit 2,41 persen dalam APBN kalau saya pribadi itu melihat adalah hal yang wajar buat Indonesia karena Indonesia ini dalam taraf pembangunan. Jadi tentu saja memiliki kebutuhan yang sangat tinggi sekali. Bahwa ditutupi oleh utang ya itu memang konsekuensi logis karena pembiayaan salah satu sumbernya adalah dari utang,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah merupakan *agent of development* yang harus bisa menjadi pionir untuk mendorong pertumbuhan. Meskipun peran kontribusi dari belanja pemerintah (*government spending*) terhadap PDB sekitar 9–10 persen, tetapi peran negara sebagai pionir untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting. Misalnya saja seperti pembangunan infrastruktur. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa keterbatasan total belanja negara sebesar Rp2.080,5 triliun harus dioptimalkan untuk membiayai hal-hal yang sifatnya produktif, bukan konsumtif.

Teks Abdul Aziz



Launching  
Sukuk  
Tabungan

Foto  
Tino Adi  
Prabowo

Safuadi, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko mengatakan, selama ini pemerintah berusaha meningkatkan capaian penerimaan melalui pajak, bea cukai, hibah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun, jumlahnya tidak mencukupi keseluruhan belanja negara. Defisit ini harus ditutup melalui pembiayaan, salah satunya adalah melalui utang.

Dipaparkan Safuadi lebih lanjut, prioritas nasional saat ini adalah percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur. Janji dan kewajiban negara kepada rakyat ini membutuhkan dana yang sangat besar, tetapi terkendala kapasitas APBN yang terbatas. “Selama utang digunakan untuk secara produktif seperti pembangunan infrastruktur (termasuk kesehatan dan pendidikan) yang berdampak positif bagi sosial ekonomi masyarakat, utang bukan hal yang perlu ditakutkan,” ujarnya.

Senada dengan Safuadi, Nur Cholis Madjid, Widyaiswara BPPK mengatakan alasan utama pemerintah berutang adalah untuk kesejahteraan rakyat. “Sama seperti ketika seorang kepala keluarga yang membeli rumah melalui KPR, rumah tersebut pada ujungnya adalah untuk kesejahteraan keluarganya” ujar Nur Cholis.

Menurut Nur Cholis, hal yang terpenting adalah utang tersebut produktif bukan konsumtif. Nur Cholis mencontohkan, pembangunan Jalan Tol Jagorawi sudah dilakukan lebih dari 40 tahun yang lalu dengan menggunakan utang. Hingga saat ini jalan tersebut masih ada dan terus memberikan manfaat. “Utangnya sudah tertutup dari hasil jalan itu. Malah sampai sekarang masih menguntungkan,” katanya.

Utang juga dapat mempercepat penerimaan manfaat pembangunan. Jika menunggu penerimaan negara terkumpul, untuk membangun jalan Tol Trans Jawa misalnya, akan membutuhkan waktu bertahun-tahun sehingga baru bisa dinikmati 25 tahun mendatang. “Dengan berutang, manfaat dari keberadaan jalan tersebut bisa dirasakan dalam 5 tahun” ujar Saifudin. Selama dikelola dengan baik, utang merupakan pembiayaan alternatif yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

#### Kesalahpahaman Umum

Menilai beban utang tidak bisa dilihat semata dari jumlahnya saja, tetapi juga harus dilihat dari presentase kekayaan. Sepanjang rasio utang terhadap PDB masih dalam batas wajar, utang tidak akan membebani anggaran negara.

Sebagian masyarakat juga beranggapan bahwa utang negara akan membebani anak cucu. Padahal, sepanjang utang tersebut digunakan secara produktif, justru akan membawa angin segar. “Dengan utang, anak cucu kita akan bisa punya pendidikan dan pekerjaan yang baik. Kalau mereka semakin kuat, harusnya utang menjadi sesuatu yang ringan. Sementara kalau mereka lemah, jangankan utang Rp10 juta, Rp1 juta saja sudah terasa berat,” ujar Nur Cholis.

Selain itu, utang negara berbeda dengan utang pribadi. Utang pribadi harus dilunasi oleh keluarganya begitu orang tersebut meninggal, sementara negara diciptakan untuk eksis selamanya. Dengan begitu, akan banyak skenario untuk mengelola utang, misalnya melalui restrukturisasi pembiayaan.

#### Pembangunan Dibiayai Rakyat Sendiri

Meski berutang dalam jumlah besar, negara maju seperti Jepang mampu mengelola strategi pembiayaan dengan baik. Sebagian besar utangnya dimiliki oleh rakyatnya sendiri. Berkaca dari hal tersebut, pemerintah mendorong

agar basis investor domestik meningkat. “Dengan begitu, pembiayaan pemerintah akan semakin mandiri dan terhindar dari risiko kurs atau *hot money*,” kata Safuadi.

Pada beberapa kali penerbitan ORI dan Sukuk Ritel, minat beli masyarakat terlihat tinggi, meski kondisi pasar keuangan masih dipengaruhi ketidakpastian ekonomi global. Penerbitan SBN ritel yang selalu *oversubscribed* menandakan bahwa fitur-fitur yang ditawarkan menarik dan sesuai kebutuhan investor. “Khusus untuk Sukuk Negara Ritel, kelebihan permintaan menandakan besarnya keinginan investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur, mengingat *underlying asset*-nya berupa proyek-proyek infrastruktur,” jelas Safuadi.

Nur Cholis mengingatkan, pemerintah harus waspada dengan tingkat bunga yang diberikan. “Kalau tingkat bunga SBN lebih tinggi dari pasar, wajar kalau swasta tidak kebagian investasi karena mereka akan menaikkan imbal hasilnya sehingga berpotensi menimbulkan *crowding out effect*,” katanya. Selain itu, tingginya minat masyarakat untuk membeli SBN tidak boleh menjadikan pemerintah malas mengejar pajak. “Utang tidak boleh berlebihan, kita tetap harus mengoptimalkan penerimaan.”

Teks Irma Kesuma



Foto Arfindo Briyan

## Pembiayaan Penuh Manfaat

Utang yang produktif dan terjangkau menjadi salah satu penopang pembangunan. Saatnya masyarakat mengubah paradigma negatif mengenai utang.

Utang tak selamanya mengandung konotasi negatif. Dalam mencapai sasaran pembangunan secara tepat waktu dan tepat sasaran, utang terkadang diperlukan. Utang produktif yang selama ini dilakukan pemerintah telah digunakan untuk membiayai berbagai pembangunan di Indonesia, khususnya infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Simak pembicaraan Media Keuangan dengan Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, mengenai strategi pembiayaan di tahun 2017.

**Selama ini, komponen pembiayaan masih merupakan salah satu penyangga utama pembangunan Indonesia. Utang merupakan salah satu sumber pembiayaan APBN untuk menutup defisit negara. Bagaimana pengaruh utang pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi?**

Dengan berutang, pemerintah bisa melaksanakan program-program yang sudah dicanangkan, yaitu program jangka menengah dan program tahunan. Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, sumber pertumbuhan berasal dari konsumsi (konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah), investasi, dan kegiatan ekspor impor.

Di Indonesia, komponen pertumbuhan yang berasal dari konsumsi itu berperan sangat signifikan, yaitu lebih dari 50 persen. Maka, utang memungkinkan pemerintah melaksanakan *government spending* (konsumsi pemerintah) sesuai yang direncanakan sehingga secara otomatis akan menciptakan permintaan (*demand*) yang membuat perekonomian semakin tumbuh. Terlebih jika pemerintah melakukan konsumsi yang berkualitas dan menciptakan produktivitas. Sebenarnya ini adalah kata kuncinya. Utang yang dibelanjakan dengan tepat sasaran akan membawa manfaat saat ini juga, yaitu produktivitas yang harus kita tunggu beberapa tahun lagi bisa dinikmati di masa sekarang. Tentu saja hal ini akan membawa kesejahteraan masyarakat, kita tidak perlu menunggu beberapa tahun lagi.

**Utang pemerintah cenderung memiliki paradigma negatif. Bagaimana seharusnya utang dipandang dalam sebuah perekonomian negara?**

Pemerintah perlu menyampaikan manfaat berutang kepada masyarakat. Satu hal yang perlu diperhatikan yakni, ke depan, manfaat utang ini lebih besar daripada bunga yang harus kita bayar. Sepanjang kualitas belanjanya bagus, yaitu untuk infrastruktur, berutang tidak menjadi masalah. Syaratnya, sepanjang utang tersebut masih aman dan berada di level yang *sustainable* (berkelanjutan).

Masyarakat seharusnya tidak memandang utang hanya dari besaran nominalnya, itu sangat tidak pas. Misalnya, utang Rp1 miliar bagi si A berbeda dengan utang Rp1 miliar bagi si B. Perbedaannya terletak di

penghasilan A dan B. Begitu juga dengan utang pemerintah, besaran utang berkaitan dengan Produk Domesik Bruto (PDB) nasional. Jadi, jangan melihat besaran utang hanya dari nominal Rupiah atau Dollar. Dengan utang kita yang mencapai Rp3500 triliun, *outstanding* utang kita terhadap PDB masih dalam kategori aman, yaitu sekitar 27,7 persen. Kita perlu waspada kalau *outstanding* utang mencapai 60 persen ke atas. Lagipula, rata-rata jatuh tempo utang kita sekitar 9-10 tahun. Bukan yang tahun depan harus kita bayar.

**Apa strategi pemerintah di tahun 2017 dalam mencari sumber pembiayaan yang aman dan terjangkau?**

Andalan utama pembiayaan adalah Surat Berharga Negara (SBN) karena pembelinya bisa ratusan bahkan ribuan. Indonesia harus mengandalkan SBN yang telah memiliki pasar yang luas, sehingga kita tidak perlu tergantung pada suatu investor. Pembiayaan dari pinjaman semakin berkurang. Jika kita lihat di APBN, dari tahun ke tahun kita mengurangi pinjaman. Pemerintah lebih banyak membayar kembali (utang dan bunga utang) daripada menambah pinjaman. Sejauh ini, pasar SBN adalah satu-satunya sumber pembiayaan yang paling andal.

**Bagaimana perkembangan SBN di Indonesia?**

Kami berupaya memastikan SBN bisa diterima dengan baik dan bisa lebih berkembang di pasar.

SBN diterbitkan sejak tahun 2006. Saat ini sudah cukup *developed*, namun kami terus berupaya melakukan diversifikasi untuk memenuhi selera dan kebutuhan investor. Kami memiliki SBN yang konvensional, sering disebut dengan Surat Utang Negara (SUN), juga ada SBN syariah yang biasa disebut Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Kami menerbitkan SBN tersebut dengan berbagai seri, ada seri 5 tahun, 10 tahun, 2 tahun, bahkan 3 bulan. Diversifikasi juga dilakukan dalam mata uang, seperti mata uang Rupiah, Euro, Japanese Yen, dan sebagainya.

**Seringkali SBN mengalami *oversubscribed* (kelebihan penawaran). Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal ini?**

*Oversubscribed* berarti menunjukkan minat masyarakat yang sangat besar, itu bagus. Dalam mengembangkan SBN, pemerintah telah berhasil melakukan lelang rutin, yaitu setiap hari Selasa. Kami tidak menerbitkan SBN secara sporadis. Satu hal yang penting, salah satu syarat untuk memastikan SBN suatu negara negara itu menarik yaitu pasar sekunder SBN harus hidup. Pasar sekunder yaitu pasar jual beli. Misal ada seseorang yang membeli SBN Republik Indonesia bulan lalu, maka hari ini juga bisa dijual. Artinya SBN tersebut bersifat *liquid* (mudah dicairkan). Pasar sekunder kita cukup aktif, transaksi perdagangan dalam satu hari bisa mencapai Rp17 triliun. Hal itu pula yang menjadikan SBN kita sangat laku di pasaran.

Teks Pradany Hayyu

## Menkeu Resmikan Gedung Mar'ie Muhammad



Berepatan dengan empat puluh hari kepergian mantan Menteri Keuangan Marie Muhammad, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menetapkan nama gedung utama kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Kamis (19/01). Gedung tersebut dinamai Gedung Mar'ie Muhammad. Pemberian nama mantan Menkeu tersebut sebagai wujud simbolis untuk mengenang nilai-nilai dari beliau, yaitu keteladanan atas kejujuran, integritas, komitmen, serta loyalitas terhadap pencapaian tujuan negara dan membangun Indonesia yang bersih.

Dalam sejarahnya, Mar'ie Muhammad pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak pada periode 1988-1993, kemudian menjadi Menteri Keuangan pada periode 1993-1998. Beliau dikenal sebagai seorang pejabat yang bersih, sederhana, dan seorang pendobrak. Di saat semua orang menganggap ketiadaan integritas sebagai suatu hal yang biasa, Mar'ie Muhammad tetap berdiri tegak pada integritasnya, sehingga ia mendapat julukan *Mr. Clean*.

Oleh karena itu, Menkeu berharap pemberian nama ini dapat menginspirasi pegawai Kemenkeu, khususnya DJP, untuk dapat bekerja maksimal tanpa mengorbankan integritas dan semangat profesionalisme. “Dengan melihat nama beliau ada dalam gedung ini (semoga) tetap bisa mengingatkan kita setiap hari untuk bisa menjalankan tugas fungsi kita, namun tanpa kita mengorbankan atau menjualbelikan *integrity* dan

kejujuran, komitmen dan loyalitas terhadap tujuan negara kita,” jelas Menkeu.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto menyatakan bahwa Mar'ie Muhammad telah memberikan inspirasi dan teladan bagi seluruh pegawai Kemenkeu. “Keteladanan beliau adalah sesuatu yang penting untuk kita wujudkan. Apabila seseorang tidak amanah dengan uang maka dia tidak akan amanah dalam hal yang lain, itu adalah kalimat yang sering diucapkan oleh beliau,” jelas Hadiyanto.

Acara penetapan nama ini juga dihadiri oleh keluarga besar Mar'ie Muhammad, mantan Menkeu Agus Martowardoyo dan Chatib Basri. Pihak keluarga, yaitu istri (Alm) Marie Muhammad, Ayu Resmayati, juga mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan.

Teks Dewi Rusmayanti

## Sinergi Visi Untuk Negeri

**K**ementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional dengan tema “Sinergi Untuk Negeri”. Acara yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan seluruh jajaran pejabat eselon I dan perwakilan dari pejabat eselon II Kemenkeu ini berlangsung di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I, Jakarta pada Selasa (10/01).

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan komunikasi yang terintegrasi pada level pimpinan unit eselon I dan eselon II. Sesjen mengharapkan agar terbentuk persepsi dan pemahaman yang sama di jajaran pimpinan mengenai rencana kerja

Kemenkeu. Lebih lanjut, menurutnya, sinergi seluruh komponen organisasi menjadi hal yang krusial untuk dilakukan.

Melalui kegiatan ini pula, Menkeu hadir memberikan arahan tentang perlunya memahami peran dari setiap pegawai Kemenkeu yang sangat strategis. Menurut Menkeu, setiap pegawai dan pejabat di Kemenkeu harus bisa menempatkan dirinya dalam posisinya untuk memberikan pelayanan kepada rakyat Indonesia. “Yang Anda lakukan ini adalah *so important*, tapi jangan pernah Anda merasa sok penting. Karena di situ letaknya *humility* dan pelayanan,” kata Menkeu.

Menkeu juga menjelaskan bahwa untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi, Kemenkeu harus bisa membuat kebijakan yang

bersifat *growth friendly*. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membuat kebijakan fiskal yang sebelumnya bersifat konsumsi (*consumption led growth*) menjadi yang bersifat investasi (*investment led growth*).

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa sejak tahun 2015 pemerintah telah melakukan reformasi fiskal, terutama dari sisi belanja negara. Saat ini, kualitas belanja semakin membaik dengan meningkatnya belanja yang bersifat produktif, skema subsidi yang tepat sasaran, kenaikan belanja infrastruktur, dan komitmen pada program pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

**Teks** Dewi Rusmayanti



## Tahun 2050 Listrik Bisa Gratis

**K**eberlanjutan energi sangat vital bagi pembangunan. Kesejahteraan tidak akan dapat dirasakan semua lapisan masyarakat bila akses terhadap energi masih terbatas. Selain itu, kita harus menggunakannya dengan cara yang ramah lingkungan. Rinaldy Dalimi, anggota Dewan Energi Nasional (DEN) menceritakan kepada Media Keuangan pandangannya akan masa depan energi Indonesia.



**Foto**  
Bagus Wijaya

### Seperti apa kebutuhan dan ketersediaan energi di Indonesia saat ini?

Dari sisi kebutuhan ada dua bagian besar yaitu listrik serta minyak dan gas (migas). Listrik tidak bisa disimpan, harus dibangkitkan dan diantarkan ke konsumen dengan kabel. Sedangkan migas bisa disimpan dan ditransfer dengan mobil atau pipa.

Potensi migas kita cukup, tetapi produksi minyak menurun karena eksplorasinya tidak secepat penggunaannya. Kita juga mengeksplor sekitar 50 persen produksi gas. Menjual gas tidak bisa seperti menjual komoditas lain. Kita bisa menaruh beras di toko dan menunggu orang yang mau beli. Sedangkan gas, sebelum kita eksplorasi, sudah harus ada pembelinya. Selain itu, penjual harus menjamin untuk memasok pembeli selama 30 tahun. Dengan kontrak jangka panjang seperti itu, meski di dalam negeri juga membutuhkan gas, kita tidak bisa mengambilnya begitu saja.

Dalam kebijakan dan rencana umum energi nasional sudah ditetapkan bahwa ekspor energi, khususnya gas dan batubara, harus dikurangi secara bertahap dan akhirnya dihentikan. Untuk batubara, kita sekarang ekspor hampir 80 persen dari produksi. Tetapi tidak selalu kontrak jangka panjang karena batubara masih bisa ditumpuk. Kalau kita tidak produksi seminggu, tidak apa-apa. Nah, jadi dari sisi potensi sebenarnya kita cukup.

### Apa permasalahan utama di sektor energi kita?

Dari sisi distribusi harus ada tata kelola yang tepat. Tidak seperti Cina, India, Eropa, atau Amerika yang wilayahnya daratan semua, Indonesia adalah negara kepulauan sehingga distribusi energi lebih sulit. Contohnya distribusi listrik. Energi listrik tidak bisa disimpan sehingga begitu pembangkitnya dibangun energinya harus digunakan. Jika tidak digunakan, pembangkitnya akan menganggur. Dengan

demikian, perencanaan pembangunan pembangkit harus disesuaikan dengan kebutuhan.

Proyek listrik 10.000 MW dan 35.000 MW yang pernah dan sedang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi proyeksi kebutuhan yang sudah ditetapkan. Kalau terlambat membangun pembangkit tenaga listrik, dampaknya adalah pemadaman bergilir akibat meningkatnya kebutuhan, serta tertundanya ketersediaan listrik di daerah yang belum dialiri listrik.

Selain itu, distribusi BBM untuk daerah-daerah terpencil masih terkendala keterbatasan infrastruktur. Di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan, banyak SPBU yang dari siang BBM-nya sudah habis. Bahkan ada daerah yang tidak punya SPBU sehingga harga BBM menjadi tinggi.

### Apakah bisa dikatakan bahwa Indonesia ketergantungan pada migas?

Semua negara tergantung kepada migas sebab itulah energi utama dunia. Kita sedang berusaha mengurangi peran energi fosil yaitu batubara dan migas. Selain tidak ramah lingkungan, suatu saat nanti energi fosil juga akan habis. Kita akan gantikan dengan energi alternatif seperti air, matahari, panas bumi, bio energi, energi laut, atau energi angin yang terbarukan. Bahkan di Jerman dan Cina pembangkit angin dan mataharinya sudah lebih besar dari seluruh pembangkit yang ada di Indonesia.

*Energy Outlook* dari International Energy Agency menyatakan bahwa tahun 2040 energi dunia akan disuplai dari energi terbarukan sebanyak 37 persen, lebih besar daripada target Indonesia sebanyak 23 persen tahun 2025 dan 31 persen tahun 2050. Artinya target kita sangat mungkin dicapai. Bahkan dalam tugas akhir saya di Lemhanas tahun 2008, saya memperkirakan Indonesia bisa menggunakan energi terbarukan sebanyak 75 persen di tahun 2050. Nantinya setiap

individu akan memproduksi listrik sendiri dengan menggunakan *solar cell* di atap rumah.

Waktu itu sedikit sekali orang di Eropa dan Amerika yang menggunakan *solar cell*. Sekarang di Indonesia saja sudah banyak. Kalau sekarang kita ke London, taksi di sana sudah menggunakan mobil listrik. Di atas tempat parkir sudah tersedia *solar cell*. Mereka bisa mengisi bahan bakar mobilnya seperti seperti men-charge telepon selular. Saya tidak khawatir kita akan kekurangan minyak, karena minyak memang tidak akan digunakan lagi untuk alat transportasi.

### Solar cell diprediksi akan ada di setiap rumah. Apa kelebihanannya?

Saat ini efisiensi *solar cell* sekitar hampir 20 persen. Artinya, dari potensi energi matahari sebesar 1.000 watt setiap 1 meter persegi, kita bisa menyerap sekitar 200 watt. Jepang dan Australia sudah mengumumkan menemukan teknologi efisiensi *solar cell* 40 persen, tetapi belum diproduksi. Dunia internasional meramalkan tahun 2030 efisiensi *solar cell* sekitar 50 persen.

Anggap saja setiap rumah sederhana bisa pasang *solar cell* 50 meter persegi. Dengan efisiensi 50 persen berarti bisa menyuplai 25.000 watt. Jika matahari hanya bersinar 6 jam perhari, kita masih dapat 6.250 watt. Jika setiap rumah bisa memproduksi daya segitu, kita sudah bisa foya-foya. Di samping punya AC, kulkas, pompa air, dan peralatan listrik lain, kita masih bisa men-charge mobil di rumah masing-masing.

Ketika kita sudah bisa memproduksi listrik untuk kebutuhan kita sendiri, perusahaan listrik, transmisi tegangan tinggi, dan kawat yang berseliweran itu sudah tidak ada lagi. Mulai dari sekarang kita harus membuat perencanaan yang menuju ke sana.



Foto  
Rian Fauzi

### Ke mana Indonesia bisa melakukan benchmark?

Di Abu Dhabi harga listriknya 2,99 sen/kwh. Di India sudah 3 sen/kwh. Di Arab Saudi sudah di bawah 10 sen/kwh. Di sana memang mereka punya padang pasir yang luas dengan radiasi matahari yang besar. Selain itu, banyak insentif pajak diberikan. Sementara di Indonesia harga listrik masih 78 sen/kwh. Radiasi kita lebih rendah daripada di Timur Tengah. Selain itu, dengan efisiensi *solar cell* yang baru 20 persen serta harga teknologi yang masih mahal, saat ini masih lebih ekonomis bila menggunakan listrik dari PLN.

### Bagaimana dengan energi alternatif lainnya?

Perkembangan energi terbarukan dunia tergantung kepada potensi masing-masing. Di Indonesia, potensi yang besar kan tenaga air dan panas bumi. Untuk pembangkit listrik yang besar-besar, kita arahkan ke sana. Namun secara bertahap apabila harga *solar cell* sudah lebih murah daripada harga listrik PLN, kita akan pasang sendiri tanpa disuruh lagi.

Sama halnya dengan lampu hemat energi. Dulu lampu jenis ini diberi gratis oleh PLN supaya masyarakat bisa mencoba. Sekarang tanpa dikasih gratis *pun* kita beli sendiri, kan. Nah begitu pula penggunaan *solar cell*. Kalau sudah murah kita akan pasang sendiri. Kapan itu? Prediksi dunia tahun 2030, tetapi saya yakin akan lebih cepat. Tahun 2050 harga listrik itu akan murah sekali bahkan gratis.

### Melihat kondisi saat ini, apakah bisa dikatakan Indonesia krisis energi?

Definisi krisis energi adalah apabila suplai terhambat sehingga mengganggu jalannya pemerintahan, baik di kabupaten, provinsi, apalagi pusat. Sementara, kondisi rusaknya penyaluran disebut darurat karena akan lama perbaikannya. Namun di sisi lain, masyarakat umum mungkin menganggap krisis energi sudah terjadi akibat seringnya pemadaman listrik. Saya memaklumi itu karena memang kemampuan pemerintah untuk membangun infrastruktur energi listrik, khususnya kemampuan dana, tidak secepat pertumbuhan kebutuhan. Jadi wajar masih ada daerah yang mengalami pemadaman. Tetapi secara definisi peraturan, belum dapat disebut krisis jika pemerintahan masih bisa berjalan.

### Apa harapan Bapak untuk tata kelola energi ke depan?

Perencanaan energi Indonesia harus dilakukan secara regional, kalau bisa per pulau, setidaknya lima pulau terbesar. Dengan begitu, potensi daerah akan tergali. Setiap daerah bisa menggunakan sumber energi apa saja yang mereka punya. Misalnya batubara, tenaga air, atau tenaga uap. Selain itu, harga listrik akan menjadi harga regional sehingga di daerah yang memiliki listrik murah akan tumbuh industri.

Teks Irma Kesuma Dewi



## Siap Wujudkan Desentralisasi

Direktorat Pembiayaan dan Transfer Non-Dana Perimbangan, DJPK

Perubahan dalam organisasi tak selamanya buruk untuk dilakukan. Seperti halnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) yang melakukan penataan organisasi untuk memperkuat tugas dan fungsi. Pada Juni 2016 lalu, Ahmad Yani dilantik Menteri Keuangan sebagai Direktur Pembiayaan dan Transfer Non-Dana Perimbangan (PTNDP). Kemudian pada Desember 2016, Ubaidi Socheh Hamidi resmi membawahi direktorat yang berlokasi di gedung Radius Prawiro lantai 12 tersebut.

Direktorat PTNDP sebenarnya bukan merupakan unit Eselon II baru, namun merupakan pengembangan dari direktorat sebelumnya, yaitu Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah (PKD). Direktorat PTNDP merupakan bagian dari penataan organisasi DJPK yang bertujuan untuk lebih menajamkan fungsi unit, menyesuaikan beban kerja dan tugas berdasarkan fungsi, serta mengakomodir tugas-tugas yang belum tertampung pada unit yang sudah ada.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat PTNDP menyelenggarakan fungsi (1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan dan transfer non dana perimbangan; (2) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan dan transfer non dana perimbangan; (3) penyiapan perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria pembiayaan dan transfer non dana perimbangan; (4) penyiapan pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pembiayaan dan transfer non dana perimbangan; serta (5) pelaksanaan urusan tata usaha.

Mengingat penajaman fungsi di atas, maka keberadaan Direktorat PTNDP ini sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam UU tersebut, Kementerian Keuangan menetapkan alokasi dana desa yang bersumber dari belanja pusat dengan

mengefektifkan program yang berbasis desa.

### Layanan Unggulan

Dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder, Direktorat PTNDP tak pernah main-main. Beberapa layanan kinerja unggulan Direktorat PTNDP antara lain (1) merumuskan kebijakan pengalokasian Dana Desa; (2) merumuskan kebijakan pengalokasian Dana Insentif Daerah (DID); (3) meningkatkan efektivitas pengelolaan hibah daerah; (4) melaksanakan penyaluran TKDD yang berbasis kinerja pelaksanaan; (5) harmonisasi regulasi obligasi daerah dalam rangka mempercepat penerbitan obligasi daerah; serta (6) melakukan penyusunan laporan keuangan konsolidasi antara laporan keuangan pemerintah daerah (LPPD) dengan laporan keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (LKTD).

Salah satu bentuk pencapaian Direktorat PTNDP yaitu menempatkan Dana Insentif Daerah (DID) sebagai instrumen penting dalam meningkatkan



Ubaidi Socheh Hamidi, Direktur PTNDP.

Tampak depan Direktorat PTNDP

Foto Adhi Kurniawan

kinerja daerah. Kinerja daerah meliputi kinerja kesehatan fiskal, dan pengelolaan keuangan daerah, kinerja pelayanan dasar publik, serta kinerja ekonomi dan kesejahteraan.

Terlebih, pada 7 Desember 2016 lalu, Kementerian Keuangan melalui DJPK menggelar Anugerah Dana Rakca 2016 sebagai bentuk apresiasi kepada kepala daerah yang berkinerja baik. Sebagian penghargaan tersebut diberikan secara langsung oleh Presiden Jokowi di Istana Negara. Tentu saja, apresiasi ini akan memberikan inspirasi bagi daerah lainnya untuk meningkatkan kinerja daerahnya masing-masing, serta menumbuhkan kompetensi yang sehat untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

### Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat PTNDP digerakkan oleh 67 pegawai yang terdiri dari 52 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Keseluruhan pegawai terbagi dalam lima Subdirektorat, yaitu 1) Subdit Hibah, Dana Darurat, dan Dana Insentif Daerah; (2) Subdit Dana Desa, Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; (3) Subdit Akuntansi dan Pelaporan Transfer ke Daerah; (4) Subdit Perumusan Kebijakan Non Dana Perimbangan; dan (5) Subdit Pelaksanaan Transfer.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas, Direktorat PTNDP juga memiliki kelompok Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah yang diharapkan dapat memberikan masukan secara lebih komprehensif dan tajam dalam melakukan perumusan kebijakan. Selain itu, untuk mendukung kelancaran administrasi, Direktorat PTNDP juga dibantu oleh satu orang Kepala Subbag Tata Usaha.

### Target Kerja dan Tantangan

Pada awal tahun 2017 ini, Direktorat PTNDP bertekad untuk memberikan pelayanan dan kinerja lebih baik. "Kami akan memberikan perhatian besar pada upaya reformulasi kebijakan Dana Desa dan Dana Insentif Daerah yang lebih transparan dan akuntabel," ujar Ubai, sapaan akrab Direktur PTNDP ini dengan optimis. Ubai menjelaskan, upaya yang akan dilakukan

dalam semester pertama tahun ini yaitu melakukan kerja sama dengan akademisi untuk membantu merumuskan formula alokasi Dana Desa, serta menyiapkan analisa dampak penggunaan Dana Desa terhadap gini ratio.

Di samping itu, Direktorat PTNDP akan menyiapkan kriteria pengalokasian DID yang mudah dikontrol dan dievaluasi, kemudian menyiapkan *Standard Operational Procedure* (SOP), regulasi, dan dukungan teknologi untuk melakukan sinergi penyaluran Dana Desa dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Terakhir, Direktorat PTNDP akan menyiapkan kebijakan afirmasi bagi daerah perbatasan, tertinggal, dan kepulauan melalui *instrument* Dana Desa dan Hibah. Kebijakan afirmasi tersebut diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah tertinggal.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat PTNDP tak lepas dari berbagai tantangan. Tantangan terbesar yang dihadapi yaitu bagaimana satu subdirektorat mampu menjalankan tugas perumusan kebijakan, perencanaan, pengalokasian, pemantauan dan evaluasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Otonomi Khusus, juga harus melakukan tugas pengelolaan Dana Desa. Dalam APBN 2017, anggaran Dana Desa berjumlah Rp60 triliun yang dialokasikan kepada 74.954 desa di seluruh Indonesia.

Ke depan, Direktorat PTNDP berupaya semaksimal mungkin untuk menempatkan diri sebagai bagian penting dalam organisasi DJPK demi mewujudkan tujuan utama desentralisasi, yaitu *public service delivery* dan kesejahteraan masyarakat. "Untuk mencapai tujuan utama tersebut, instrumen pembiayaan, transfer, dan Dana Desa harus diarahkan pada upaya mengurangi kesenjangan pelayanan publik, kemiskinan, mendorong perekonomian, dan memperluas lapangan kerja," tutur Ubai.

Teks Pradany Hayyu

NUGROHO WAHYU WIDODO

# MENGAYOMI DAN MEMBUMI

Foto  
Dok. pribadi

S uatu pagi di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) Batam, terlihat beberapa sampah tercecer. Tak lama tampak sosok berseragam bea cukai memunguti sampah tersebut tanpa segan, lalu membuangnya ke tempat sampah. Sementara di depan mushola kantor terlihat beberapa sandal tak beraturan. Sosok itupun tak sungkan menata ulang dengan rapi. Bila esoknya ia temukan sandal tersebut berantakan lagi, ia pun akan menatanya lagi, begitu seterusnya ia akan lakukan hingga kini rapih dengan sendirinya.

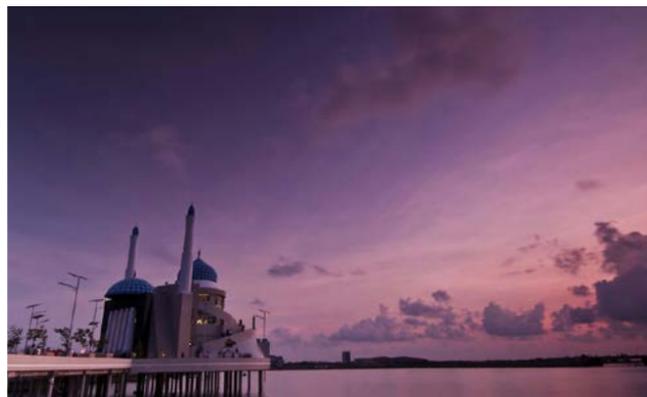
Sosok tersebut tak lain adalah Kepala Kantor KPUBC Batam, Nugroho Wahyu Widodo. Sebagai seorang kepala kantor, ia tak malu membersihkan sampah dan menata sandal yang beserakan sendiri. Tujuannya tentu saja memberikan contoh kepada pegawainya. Memang tak mudah membentuk suatu budaya baru, namun lambat laun para pegawai pun akan menyadari dan mencontohnya. Menurutnya, gaya kepemimpinan dengan sikap keras (marah-marah) tidak perlu dilakukan ketika seorang pemimpin sadar akan pentingnya *role model* untuk menjadi panutan bawahannya. Selain itu, memang diperlukan konsistensi dalam memberikan teladan.

“Seperti kata Ibu Menteri Keuangan, jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia dengan amal nyata. Dengan perbuatan nyata yang selalu kita lakukan dengan baik,” ujarnya. Kata-kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ini seperti magis baginya untuk mendorong dirinya menerapkan gaya kepemimpinan yang humanis. Baginya, gaya tersebut menjadikannya lebih mudah dalam memimpin kantor, merangkul bawahannya, serta membuatnya lebih bahagia.

#### Komunikasi dan Penguatan Internal

Bagi Nugroho, penempatan dirinya di Batam merupakan suatu capaian, karena selama ini dirinya selalu ditempatkan di Pulau Jawa. Sebelumnya, Nugroho pernah diberikan amanah untuk menjabat sebagai Kepala Kantor KPPBC Kudus dan mampu mengusung kantor tersebut sebagai satu-satunya kantor di Kementerian Keuangan yang pertama kali memperoleh ISO 9001. Saat memimpin kantor di Kudus, ia rutin melakukan kerja sama dengan media massa untuk mengedukasi masyarakat. Nugroho sangat percaya bahwa salah satu faktor keberhasilan dari suatu kantor itu adalah dengan adanya dukungan dari masyarakat yang kuat. Dukungan tersebut dapat ditumbuhkan dengan cara mengedukasi mereka melalui berbagai media. Ia yakin dengan menjadikan unit humas sebagai salah satu pilar unitnya, ia akan dapat memajukan kantornya.

Di samping komunikasi yang baik, pengawasan dan pelayanan juga menjadi kunci dalam memajukan kantor. Menurutnya, bahasa penyampaian yang baik saja tidak akan berarti tanpa bukti kerja yang nyata. Untuk itu, penguatan internal pun perlu dilakukan melalui pembangunan sumber



Beberapa foto hasil jepretan Nugroho.

Foto Dok. Pribadi

daya manusia yang mumpuni dan militan. Baginya, yang paling penting dalam membina pegawai adalah dengan bentuk *care*. *Care* dalam arti yang sesungguhnya, yaitu untuk mengetahui setiap persoalan dari orang lain. Hal itu terlihat saat ada pegawai baru yang masuk di kantornya. Hal yang pertama kali dilakukannya adalah melakukan *brainwash* terlebih dulu. Tujuannya adalah agar para pegawai baru dapat memperoleh motivasi dan arahan yang lebih baik. Baginya, para pegawai baru itu adalah investasi bagi Kementerian Keuangan di masa depan.

#### Dekat dengan Alam dan Masyarakat

Pria yang menikahi Dinni Amalyati pada tanggal 2 Mei 1993 ini merasa sangat bersyukur dengan dikarunainya tiga anak, yaitu Muhammad Azzamul Haq, Rifdah Azzahra, dan Muhammad Izzatul Haq. Bagi anak-anaknya, sosok Nugroho dikenal sebagai ayah yang penyayang sehingga mereka merasa sangat dekat dengannya. Selain itu, sosok Nugroho juga mempunyai minat yang tinggi terhadap alam. Sejak kecil, ia telah mencintai kegiatan di ruang terbuka. Ia sudah mulai melakukan pendakian ke Gunung Lawu semenjak kelas II Sekolah Menengah Pertama di Solo. Terkadang ketika tidak ada kegiatan saat malam minggu, ia gunakan untuk pergi mendaki gunung. Bahkan seringkali ia turut serta membantu tim pencari dan penyelamat atau SAR dalam pencarian korban yang hilang di gunung. Hal itu menjadikannya terbiasa menolong orang yang mengalami kecelakaan di jalan raya.

Bahkan ketika Nugroho mendaftar ke Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), ia berharap tidak diterima karena sudah bertekad kuat untuk melanjutkan hobi pecinta alamnya dengan mendaftar di Universitas Indonesia dan Universitas Gajah Mada. Ia juga terobsesi menjadi seperti salah satu mahasiswa pecinta alam (mapala) dari UI, Norman Edwin, yang bisa berpetualang hingga ke luar negeri. Namun, hal yang menarik adalah di antara

perguruan tinggi yang ia ikuti seleksinya, hanya STAN yang menerimanya. Sejak itu, ia mulai aktif lagi dalam hobinya melalui STAN Pecinta Alam (STAPALA).

Nugroho juga mempunyai prinsip hidup untuk menularkan hal yang baik kepada orang lain. Hal tersebut dapat dimulai dari sesuatu yang paling ringan seperti tersenyum. Ia mencontohkan, saat ia lari pagi, ia selalu tersenyum dan menyapa setiap orang yang ditemuinya. Dengan senyum itu, pertama, minimal ia dapat memotivasi dirinya. Selanjutnya, bagi orang yang menerima senyum tersebut, ia akan dapat menularkannya kepada istri, suami atau anaknya, atau bahkan kepada tetangganya, dan begitu berlangsung seterusnya. Efek domino dari penularan energi positif inilah yang ingin dibagikannya kepada orang lain. Senyum ini menurutnya dapat diterapkan menjadi budaya organisasi. Harapannya, sikap murah senyum ini akan dapat menular ke siapapun, termasuk ke para *stakeholders* yang sedang mengunjungi kantornya

#### Peran Orang Tua

Lahir pada tanggal 22 Agustus 1969, Nugroho memiliki sosok ayah yang berprofesi sebagai guru dan ibu yang bekerja dengan berjualan bumbu di pasar. Bagi Nugroho, ayahnya adalah sosok yang cool dan penyabar, sedangkan ibunya adalah sosok yang penyayang. Terbukti dari seringnya beliau marah karena rasa khawatir dan sayangnya kepada Nugroho. Untuk urusan pendidikan, orang tuanya selalu mengutamakan anak-anaknya mengenyam pendidikan yang terbaik. Bahkan tak tanggung-tanggung, jika perlu mereka akan berutang untuk memenuhi biaya pendidikan Nugroho dan saudara-saudaranya. Sewaktu di STAN, Nugroho sendiri hanya dijatah Rp30.000 untuk memenuhi kebutuhannya selama sebulan. Seringkali ia harus makan tahu tempe sebagai lauk andalannya.

Menurutnya, sosok ayah dan ibunya seperti malaikat yang diturunkan untuk menjaga dirinya dan saudaranya. Yang ia

kagumi dari keduanya adalah mereka tak henti-hentinya memanjatkan doa bagi anak-anaknya. Kedua orang tuanya rutin bangun jam 12 malam untuk melakukan tahajud. Tak lupa mereka juga rutin melakukan puasa senin kamis. Kalau di Jawa, hal itu disebut dengan prihatin. Baginya, hal-hal tersebut sangat berperan penting dalam membentuk karakter dirinya.

Namun, ada satu penyesalan yang masih ia rasakan sampai saat ini. Sembari menahan tangis, ia bercerita rasa sesalnya karena tidak bisa berada di samping orang tuanya ketika mereka wafat. Saat ayahnya wafat, ia sendiri masih dalam kondisi sakit sehingga harus menyusul pulang. Pun ketika ibunya wafat, ia juga tak bisa menemaninya. Namun demikian, ia sangat menghormati dan meneladani orang tuanya. Satu catatan yang ia pegang teguh dari orang tuanya adalah agar selalu menjaga nama baik orang tua dan selalu bermanfaat kepada semua orang.

#### Bersyukur dan Berbagi

Sampai saat ini, ia merasa apa yang sudah diterimanya sudah lebih dari cukup. Nugroho tidak pernah membayangkan sebelumnya kalau ia akan bisa naik pesawat kemana-mana, bahkan sampai ke luar negeri walaupun hanya karena tugas. Menurutnya, semua hal tersebut harus dimaknai dengan rasa syukur. Rasa syukur tersebut dapat diwujudkan dengan cara selalu memberi manfaat kepada siapapun. Pernah suatu saat ia iseng untuk berkeliling sendiri menggunakan motor sembari mengambil foto. Baginya, sebuah foto bisa memberikan manfaat yang besar. Foto itu bisa digunakan untuk sarana *caring* dan *sharing*.

“Kita *care* terhadap sesuatu dan kita *share* apa yang kita temui itu. Dan kalau itu bisa membuat bahagia orang lain, hal itu juga menjadi kebahagiaan bagi kita,” ujarnya.

Teks Abdul Aziz

# Berkaca dari Realisasi, Berharap pada Prospek Ekonomi

Secara umum, terdapat lima isu yang mempengaruhi kondisi ekonomi global sepanjang 2016. Kelima isu tersebut adalah tingkat permintaan yang lemah, harga komoditas yang rendah, *economic rebalancing* Tiongkok, isu geopolitik seperti Brexit, dan kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat serta pembalikan arus modal dari EMEs (*Emerging Market Economy*). Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Konferensi Pers Realisasi APBN-P (Sementara) di Aula Mezzanine, Kantor Pusat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta, Selasa (3/01).

Dalam kesempatan itu, Menkeu mengungkapkan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi 2016 tetap lima persen. Asumsinya, realisasi pertumbuhan pada kuartal IV dapat mencapai minimal 4,7 persen. Konsumsi rumah tangga dan PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) masih menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Realisasi konsumsi (belanja) pemerintah akan dipengaruhi belanja pemerintah pusat yang diperkirakan lebih rendah karena penyesuaian anggaran. Sementara itu, nilai ekspor dan impor diperkirakan membaik meskipun masih tumbuh negatif.

Pada triwulan III, sektor industri pengolahan mampu tumbuh stabil didukung oleh peningkatan investasi dan

insentif dari paket kebijakan. Sementara pertambangan mampu kembali tumbuh positif setelah delapan triwulan mengalami kontraksi pertumbuhan. Sektor pertambangan tumbuh positif didukung dengan peningkatan produksi migas. Sektor jasa—yang terkait dengan sektor lain seperti transportasi dan perdagangan—serta sektor informasi dan komunikasi tumbuh dengan baik. Hal ini sejalan dengan realisasi pembangunan infrastruktur dan peningkatan efisiensi nasional.

Hasil positif dari sektor pertambangan didukung oleh pertumbuhan yang lebih tinggi dari kawasan penghasil komoditas itu, antara lain Maluku-Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Jawa sebagai kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi nasional dan bertumpu pada sektor industri tumbuh stabil sebesar 5,6 persen. Kawasan Sulawesi dan Bali Nusa Tenggara tumbuh sedikit lebih rendah dari periode sebelumnya.

Stabilitas harga dan nilai tukar terjaga pada triwulan ketiga. Hal ini menjadi salah satu indikator positif kinerja ekonomi. “Tingkat inflasi yang terjaga didukung oleh rendahnya harga komoditas serta langkah pemerintah dalam menjaga produksi dan memperbaiki arus distribusi,” kata Menkeu dalam konferensi pers tersebut.

Kinerja perekonomian domestik yang cukup baik sepanjang 2016 turut

mendorong kinerja sektor keuangan. Berdasarkan nilai tengah kurs Bank Indonesia, rata-rata nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS sepanjang tahun 2016 mencapai Rp13.307/USD. Angka ini lebih baik dibandingkan rata-rata nilai tukar tahun sebelumnya yang mencapai 13.392/USD.

## Realisasi penerimaan

Dalam paparannya, Menkeu menerangkan realisasi sementara penerimaan perpajakan mencapai Rp1.283,6 triliun. Angka ini mencapai 97,2 persen dari *outlook* penghematan atau tumbuh 3,5 persen dari 2015. Penerimaan pajak non migas tumbuh 5,7 persen dibandingkan dengan realisasinya pada tahun sebelumnya.

Apabila tidak termasuk penerimaan dari amnesti pajak sebesar Rp107 triliun, pertumbuhan penerimaan pajak non migas negatif 4,9 persen. Hasil ini antara lain dipicu oleh masih lemahnya perekonomian dan harga komoditi serta pemberian insentif perpajakan antara lain melalui perubahan batas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).

Penerimaan Bea dan Cukai secara nominal menurun dari 2015. Namun demikian, persentasi capaian naik 5,5 persen jika dibandingkan antara capaian tahun 2015 dan 2016. Salah satu faktor yang mendorong penurunan penerimaan bea dan cukai adalah produksi rokok sepanjang 2016 yang stagnan. Pada



Beberapa reformasi kebijakan fiskal APBN dilakukan melalui skema subsidi yang lebih tepat sasaran dan belanja infrastruktur yang semakin meningkat.

Foto  
Githa Adhi  
Pramana

kesempatan konferensi pers saat itu, Menkeu juga mengapresiasi kinerja jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang menyadari pentingnya upaya memerangi rokok ilegal. Menkeu juga memberikan catatan pada perbaikan penerimaan dari bea masuk pada akhir tahun yang didorong oleh usaha ekstra dari jajaran DJBC.

Dari segi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi yang tercatat hingga awal Januari 2017 sebesar Rp262,4 triliun. Angka ini telah melebihi target APBN-P hingga Rp17,3 triliun. Pencapaian PNBP didukung oleh realisasi *lifting* minyak dan gas yang melampaui target, peningkatan peran dividen Badan Usaha Milik Negara, kinerja PNBP kementerian dan lembaga yang lebih baik, dan peningkatan PNBP dari badan layanan umum.

## Realisasi pembiayaan

Jika melihat realisasi sementara pembiayaan, per awal Januari angkanya telah mencapai Rp330,3 triliun atau 111,3 persen dari pagu APBN-P. “Pembiayaan

anggaran, termasuk utang, dilakukan secara hati-hati dan dengan efisiensi maksimal,” kata Menkeu. Pemerintah konsisten menjaga defisit di bawah tiga persen dan rasio utang pada level yang *manageable*.

Menkeu melaporkan bahwa penyertaan modal negara (PMN) pada 2016 telah dilaksanakan seluruhnya. PMN kepada BUMN dalam dua tahun terakhir mencapai sekitar Rp116,4 triliun, jauh lebih besar dari penerimaan dividen BUMN sebesar Rp74,7 triliun. “Dengan demikian, BUMN menjadi motor penggerak percepatan pembangunan melalui *leverage* yang lebih tinggi,” ujarnya.

## Menyambut 2017

Di hadapan para pejabat eselon I dan II Kemenkeu, Menkeu mengatakan bahwa kebijakan fiskal dalam APBN 2017 dibuat secara kredibel, efisien dan efektif, serta berkesinambungan. Hal tersebut akan dicapai dengan melakukan optimalisasi penerimaan negara, mengelola belanja negara secara produktif dan berkualitas,

serta mengelola pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian.

“Semakin kita ingin transparan, *which is good*, Anda akan semakin dituntut untuk lebih akuntabel dan kredibel,” ujar Menkeu dalam Rapat Kerja Nasional Kemenkeu di Aula Mezzanine, Selasa (10/01). Dalam paparan berjudul “Menyambut tahun 2017: Prospek dan Tantangan”, Menkeu menjelaskan bahwa suatu negara akan menghadapi kondisi ekonomi yang sangat dinamis. Di Indonesia, hal itu bisa dilihat dari kondisi realisasi APBN-P 2016 yang mengalami naik dan turun dari target yang telah ditetapkan. “Kita tidak bisa mematok suatu angka tetapi ini adalah suatu estimasi. Kita berhadapan dengan ekonomi yang dinamis,” kata Menkeu.

Untuk menghadapi dinamika perekonomian global pada 2017, pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi. Kemenkeu, misalnya, membuat kebijakan yang bersifat *growth friendly*. Hal tersebut dapat dicapai dengan cara menggeser sumber pertumbuhan ekonomi dari yang sebelumnya bersifat



**Rudi Purwono**  
Wakil Dekan FEB  
Universitas Airlangga

konsumsi (*consumption led growth*) menjadi investasi (*investment led growth*).

APBN yang akuntabel dan kredibel akan memiliki peranan yang penting. "Kemampuan kita dalam mendesain belanja itu menjadi sangat penting," kata Menkeu. Untuk mendukung hal tersebut, Kemenkeu berkomitmen melaksanakan reformasi perpajakan yang lebih komprehensif. "Kita ingin wajib pajak kita bertambah banyak dan itu bisa terwujud kalau kita melakukan reformasi," ujar Menkeu melanjutkan.

Menyambung paparan Menkeu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazarra menyampaikan bahwa Kemenkeu optimis mampu menjaga fundamental ekonomi Indonesia di tahun 2017. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi ekonomi makro tahun 2016 yang terjaga dengan baik. "Secara *year on year* pada tahun 2016, konsumsi rumah tangga tercatat cukup stabil mencapai 5 persen pada kuartal ketiga, investasi tumbuh positif mencapai 4,1 persen, dan inflasi terjaga pada angka 3,02 persen," ujar Suahasil pada rapat kerja yang sama.

Menurut Suahasil, ada tiga sektor yang perlu diperbaiki dan perlu dibangun dengan sinergi yang baik. Ketiga sektor itu adalah sektor fiskal, sektor moneter, dan sektor riil. Selain sektor fiskal dan moneter, sektor riil juga perlu diperbaiki untuk menjaga keseimbangan ekonomi nasional. "Fiskalnya kita perbaiki, moneternya diperbaiki, tapi kalau sektor riilnya tidak diperbaiki, maka ini yang akan menjadi *bottle neck*," kata dia.



**Suahasil Nazarra**  
Kepala Badan Kebijakan Fiskal

"Hasil dari reformasi fiskal yang paling terlihat adalah kualitas belanja yang semakin membaik dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya realokasi belanja APBN ke sektor yang lebih produktif. Ini adalah *reform* kita yang paling besar selama tiga tahun terakhir. Dan ini mendapat apresiasi yang sangat besar.

terpengaruh pada tahun ini. Oleh karena itu, seluruh pihak harus diyakinkan bahwa angka asumsi pertumbuhan di 2017 bisa dicapai dengan APBN yang kredibel.

Pemerintah masih memiliki satu periode untuk menjalankan kebijakan amnesti pajak. Agar periode ini berjalan sukses, pemerintah tetap perlu terus memberikan pemahaman bahwa amnesti pajak bukan saja dilakukan untuk menambah penerimaan negara. Masyarakat yang perlu diyakinkan berasal dari beragam latar belakang, termasuk pelaku bisnis dan investor. Apa yang kita lakukan melalui kebijakan amnesti pajak adalah untuk kepentingan nasional yang akan memberikan manfaat bagi kita sendiri. Salah satunya adalah bisnis akan menjadi lebih luas dan mudah."

Beberapa reformasi kebijakan fiskal APBN dilakukan melalui skema subsidi yang lebih tepat sasaran dan belanja infrastruktur yang semakin meningkat. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan program layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta melakukan penguatan desentralisasi fiskal."

Teks Dwinanda Ardhi

# Bekali dirimu, Hadapi tantangan 2017



**Cek Kalender Diklat**  
Keuangan Negara BPPK Tahun 2017 di  
[www.bppk.kemenkeu.go.id](http://www.bppk.kemenkeu.go.id)  
#TemukanDiklatmu

# Daya Saing Listrik, EBT, dan Efisiensi APBN 2017

Teks Joko Tri Haryanto\*)

**D**alam kesempatan peresmian proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong Unit 5 dan 6 serta Ulubelu Unit 3, Presiden Jokowi mengeluhkan mahalannya harga listrik di Indonesia. Menurut Presiden, banyaknya *broker* dan makelar menjadi salah satu faktor utamanya, selain persoalan infrastruktur dan teknologi. Oleh karena itu beliau menegaskan kembali komitmen pemberantasan pungutan liar demi menciptakan daya saing listrik yang kompetitif.

Sebelumnya, terkait pertemuan Conference of the Parties (COP) 22 di Maroko, pemerintah juga menyepakati upaya konkret untuk menjalankan secara bersama-sama Paris Agreement tahun 2016, yang mencoba mengartikulasikan bagaimana kesepakatan seluruh negara di dunia untuk bekerja sama menurunkan suhu bumi dari dampak pemanasan global (*global warming*). Di level nasional, Paris Agreement diterjemahkan dalam Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) sebesar 29 persen dengan upaya domestik serta 41 persen dengan bantuan dana internasional pada 2030.

Target penurunan emisi tersebut kemudian diturunkan ke dalam target masing-masing sektor utama penyumbang emiten terbesar. Sektor

kehutanan dan lahan gambut masih tercatat sebagai penyumbang emisi terbesar di Indonesia (hingga 84 persen). Namun demikian, sektor energi juga tidak dapat diabaikan karena terformulasikan dalam berbagai sektor lainnya. Sektor-sektor lain itu di antaranya sektor energi itu sendiri, transportasi, serta limbah. Perubahan paradigma energi sebagai modal pembangunan juga mewajibkan pemerintah untuk segera mengembangkan berbagai bentuk Energi Baru Terbarukan (EBT).

Dalam pembahasan APBN 2017, pemerintah menginisiasi mekanisme subsidi EBT sebesar Rp1,3 triliun. Rencananya, alokasi subsidi EBT akan diberikan kepada pengembangan biofuel, panas bumi, sampah, tenaga matahari, dan beberapa jenis EBT lainnya. Dengan menambahkan akun belanja subsidi EBT ini, diharapkan mampu memperbaiki posisi Indonesia dalam Paris Agreement. Di samping itu, penambahan akun belanja diharapkan mempercepat pencapaian target Bauran Energi Primer (listrik dan non-listrik) pada Kebijakan Energi Nasional (KEN) tahun 2025 dari sisi EBT sebesar 23 persen sekaligus menjawab isu keberlanjutan energi. Hingga kini, realisasi pencapaian EBT sendiri baru berkisar enam persen.

Sayangnya, usulan mekanisme subsidi EBT kandas di parlemen. Dalam

pembahasan lebih lanjut, pemerintah justru diharapkan lebih banyak memberikan mekanisme insentif dan disinsentif dalam pengembangan EBT, bukan sekadar mengalokasikan subsidi secara langsung. DPR juga menilai pengalokasian subsidi EBT secara langsung malah berpotensi tidak tepat sasaran karena diberikan via korporasi, bukan ke masyarakat. DPR pun mempertanyakan ukuran kinerja tepat sasaran dari subsidi EBT itu nantinya.

## Permasalahan

Secara umum keberatan DPR terkait usulan subsidi EBT memang berasal. Kebijakan umum subsidi listrik tahun 2017 sendiri mengamanatkan kewajiban alokasi subsidi listrik yang tepat sasaran melalui beberapa mekanisme di antaranya meningkatkan efisiensi anggaran subsidi listrik, memperbaiki mekanisme penyaluran penerima subsidi listrik, dan memberikan subsidi listrik yang lebih tepat sasaran kepada rumah tangga miskin dan rentan untuk pelanggan 900 VA.

Berkaca dari kebijakan umum subsidi listrik 2017 tersebut, di satu sisi kebutuhan akan pengembangan EBT memang sudah tidak terbantahkan. Terlebih Indonesia sendiri dikaruniai berbagai jenis EBT yang sangat melimpah, mulai dari panas bumi, tenaga surya,



Daya saing listrik dan pengembangan EBT dapat menjadi salah satu fokus dalam APBN 2017.

Foto  
Anas Nur Huda

sampah, hingga angin. Semangat tersebut juga sudah menyatu dalam Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), pun telah menyatakan paradigma energi sebagai modal pembangunan.

Namun sayangnya, di tengah perjalanan masih banyak hambatan dan tantangan yang menghadang. Apalagi hambatan ini terjadi ketika harga internasional komoditi migas mengalami kejatuhan secara drastis. Secara otomatis, Biaya Pokok Penyediaan (BPP) berbagai pembangkit listrik berbahan bakar fosil fuel (BBM dan batu bara) menjadi lebih murah. Ketika infrastruktur yang ada masih terbatas, perhitungan biaya untung dan rugi akan memaksa pengembangan EBT jalan di tempat. Terlebih dukungan yang telah diberikan oleh pemerintah melalui mekanisme *Feed in Tarrif* (FiT)

masing-masing EBT masih jauh lebih tinggi akibat teknologi yang masih mahal, dibandingkan BPP pembangkit fosil fuel.

Pada akhirnya, rencana pengembangan EBT yang sudah masuk di dalam program KEN menjadi terhambat. Para pengembang swasta yang awalnya berlomba-lomba mengembangkan berbagai jenis EBT, mulai ragu karena tidak ada kepastian listrik yang sudah dihasilkan akan dibeli pemerintah. Di sini sebetulnya peran utama dari usulan kebijakan subsidi EBT di tahun 2017. Dengan usulan Rp1,3 triliun, diharapkan dapat memangkas selisih harga jual EBT dengan harga BPP yang sesungguhnya.

Opsi lainnya dapat ditempuh melalui pembebanan sebagian selisih biaya kepada konsumen. Malaysia sudah menerapkan opsi tersebut dalam menciptakan skema Dana Ketahanan Energi (DKE) negaranya. Hal yang sama mungkin dapat dikaji pula untuk diterapkan di Indonesia. Tentu

dengan berbagai pertimbangan yang komprehensif.

Jika tidak maka opsi terakhir yang mungkin perlu untuk diwacanakan adalah pembentukan PT PLN khusus pengembangan EBT. PT PLN EBT ini dapat menjadi anak perusahaan PT PLN konvensional ataupun beroperasi secara terpisah. Dengan pemisahan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) antara PT PLN EBT dengan PT PLN konvensional, penulis yakin ke depannya Indonesia akan mampu menjadi yang terdepan dalam pengembangan EBT di dunia.

## Efisiensi

Merujuk kepada uraian sebelumnya, daya saing listrik dan pengembangan EBT secara tidak langsung juga dikaitkan dengan upaya menciptakan mekanisme APBN 2017 yang efisien dan tepat sasaran. Untuk itu, pemerintah juga mengambil beberapa kebijakan pendukung lainnya. Misalnya, pada awal 2017 pemerintah

mengambil kebijakan mencabut subsidi listrik golongan 900 VA serta kenaikan harga BBM non-subsidi Rp300/liter. Secara personal, penulis merasa bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk nyata dari komitmen kerja, kerja dan kerja. Dalam rilis APBN 2017, pemerintah mengambil strategi utama memacu pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang dilakukan adalah mewujudkan pertumbuhan yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan menjaga APBN yang kredibel serta realistis, pengalokasian insentif bagi sektor strategis, dan dukungan untuk menjaga konsumsi yang berketahanan.

Dalam jangka pendek dan menengah, kebijakan yang dapat dilakukan antara lain menerapkan subsidi yang lebih baik serta belanja untuk kesejahteraan sosial. Dari sisi insentif, dapat diupayakan untuk menjaga pertumbuhan konsumsi sekaligus menjaga iklim investasi. Untuk jangka panjang, kebijakan yang diupayakan adalah penghitungan target penerimaan yang realistis demi meningkatkan belanja produktif termasuk infrastruktur, sekaligus penerbitan regulasi yang mendorong perdagangan domestik bernilai tambah tinggi.

Jika dilihat dari rencana pelebaran defisit yang sempat dilakukan, realisasi 2,46 terhadap Produk Domestik Bruto relatif memuaskan. Terlebih kondisi ini tak lepas dari beberapa kebijakan kontraksioner yang sudah diambil misalnya pengetatan dan pemotongan anggaran kementerian dan lembaga (K/L), termasuk penundaan anggaran ke daerah, meskipun akhirnya di paruh terakhir 2016 anggaran yang ditunda sudah direalisasikan seluruhnya.

Belajar dari upaya pengetatan anggaran tersebut, memang terasa pahit awalnya. Sama dengan kebijakan pencabutan subsidi listrik, kenaikan tarif pengurusan kendaraan bermotor serta peningkatan harga BBM non-subsidi. Namun satu hal yang perlu diingat bahwa semua kebijakan tersebut bermuara kepada tujuan menciptakan APBN 2017 yang lebih efisien dan tepat sasaran. Pencabutan subsidi listrik misalnya, didasari pada temuan adanya indikasi kelompok pengguna 900 VA yang ternyata tidak lagi memenuhi kriteria layak menerima subsidi listrik. Namun demikian, pemerintah tetap mengalokasikan subsidi listrik bagi pelanggan 450 VA.

Per 14 Januari 2017, pemerintah juga meluncurkan program bantuan beras untuk masyarakat miskin (Raskin) atau yang sekarang bernama beras untuk keluarga sejahtera (Rastra) non-tunai. Penyaluran bantuan Raskin non-tunai tersebut rencananya akan menyasar sekitar 1,4 juta keluarga kurang mampu. Sama dengan subsidi listrik, masalah ketidaktepatan sasaran penerima juga mendasari keputusan pemerintah untuk mengubah kebijakan menjadi non-tunai. Ditengarai masih banyak penduduk kategori mampu yang justru menikmati alokasi Rastra tersebut, selain persoalan ketidaktepatan lainnya (frekuensi dan jumlah).

Hampir bersamaan dengan rencana penyaluran Rastra non-tunai, pemerintah juga menyiapkan kebijakan subsidi gas 3 kg secara elektronik. Dengan demikian, ke depan masyarakat akan menerima bantuan sosial pemerintah secara paket non-tunai (Rastra, subsidi

listrik dan gas 3 kg) dalam sistem dompet elektronik (*e-wallet*). Harapannya program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah akan semakin efisien dan efektif.

Efektivitas program pengentasan kemiskinan dapat ditelusuri dari kinerja pengentasan kemiskinan tahun 2016 kemarin. Menurut data BPS, dari keseluruhan 34 provinsi di Indonesia, sebanyak 23 provinsi berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin seperti Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumut dan Lampung. Sementara 11 provinsi lainnya justru mengalami kenaikan diantaranya Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Sumatera Barat dan Maluku. Apresiasi tentu juga wajib diberikan kepada inisiatif kepala daerah yang mampu menurunkan kemiskinan di wilayah masing-masing.

Pada APBN 2017, pemerintah bertekad untuk tetap menjaga alokasi dasar seperti: anggaran pendidikan dijaga di angka 20 persen, anggaran kesehatan sebesar 5 persen, dan anggaran infrastruktur mencapai Rp387,3 triliun atau naik Rp40,8 triliun dari usulan awal. Dengan keseluruhan modalitas tersebut, pemerintah berharap APBN betul-betul mampu secara kredibel menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Karena jika tidak maka tantangan ke depan akan semakin sulit dan berliku.

Semoga!

**\*Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja.**

\*) peneliti pada Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal



# AMNESTI PAJAK

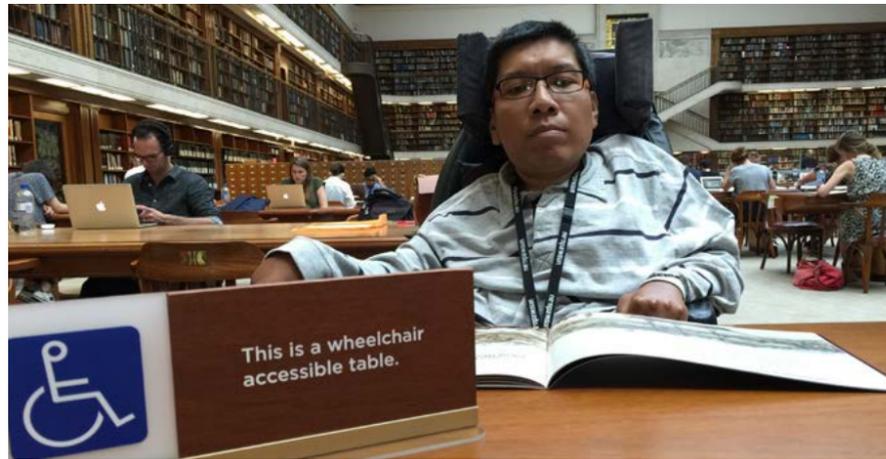
WAKTU	AMNESTI PAJAK	STATUS
30/09	PERIODE I	GATE CLOSED
31/12	PERIODE II	GATE CLOSED
31/03	PERIODE III	LAST CALL
---	-----	-----
---	-----	-----

## MANFAATKAN KESEMPATAN TERAKHIR!

Amnesti Pajak hanya sampai 31 Maret 2017



Kementerian Keuangan Republik Indonesia  
Direktorat Jenderal Pajak



mpian Antony Tsaputra untuk mengunjungi negeri-negeri yang jauh sempat menjadi tertawaan salah seorang temannya di bangku SMP.”Bagaimana kamu bisa ke luar negeri kalau ke sekolah saja selalu didorong dengan kursi roda? Apa sanggup ibumu mendorong sampai jauh?” begitu Antony—biasa dia disapa—mengenang perkataan kawannya. Berkat kegigihan dan kerja keras bertahun-tahun, penyandang disabilitas dengan *severe physical impairment* itu menjawab olok di masa remaja dengan menjadi kandidat doktor dari University of New South Wales (UNSW) di Sidney, Australia. “Saya selalu lebih mempercayai pertolongan Tuhan dan usaha sendiri dibandingkan ucapan orang lain,” katanya dalam wawancara dengan Media Keuangan belum lama ini.

Yang mengesankan, Antony menempuh pendidikan S1, S2, dan S3 tanpa biaya sendiri. Antony meraih gelar sarjana dari Universitas Andalas, Padang pada 1998 dengan skema Beasiswa Bung Hatta. Dia melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 di Griffith University, Queensland melalui pembiayaan penuh plus *disability package* dari pemerintah Australia pada 2010. Tiga tahun berselang, kesempatan untuk mengikuti program *fellowship* tentang *Disability Policy* di University of Sydney datang padanya.

“Saya juga mendapatkan kesempatan sebagai satu-satunya penyandang disabilitas yang mengikuti program *professional fellowship on legislative process and governance* di Amerika Serikat pada 2014,” kata pria kelahiran 19 Desember 1976 itu.

Dengan beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Antony kini berjuang menyelesaikan program S3 di UNSW. Topik penelitian disertasinya adalah tentang penganggaran pemerintah yang inklusif terhadap penyandang disabilitas (*Disability Inclusive Budgeting*). Di Sidney, Antony tinggal bersama istri dan ayahnya. LPDP memberikannya anggaran tambahan untuk kebutuhan khusus penyelesaian studi didampingi oleh keluarga.

Menurut Antony, keluarganya sempat sangsi jika beasiswa LPDP bersifat inklusif terhadap penyandang disabilitas. Dia pun perlu meyakinkan mereka bahwa akan lebih membanggakan jika bersekolah di luar negeri dengan biaya pemerintah sendiri. “Sekaligus juga untuk menunjukkan kepada dunia bahwa beasiswa dari pemerintah Indonesia juga bisa merata, termasuk untuk penyandang disabilitas berat seperti saya,” ujar Antony.

#### Seleksi dan persiapan keberangkatan

Berbagai tantangan dilewati

## Cita-Cita Tak Terhalang Kursi Roda

Antony saat menjalani proses seleksi dan persiapan keberangkatan (PK) LPDP. Salah satu yang diingatkannya adalah tempat seleksi substantif waktu itu tidak aksesibel bagi pengguna kursi roda. Tangga yang sangat banyak dan tinggi harus dilalui untuk sampai di ruang tes. “Saya digendong naik turun tangga bergantian oleh ayah dan seorang teman sesama peserta yang baru berkenalan pada hari itu. Namun, kondisi yang demikian tidak menyurutkan semangat saya,” kata Antony.

Hal yang sama terjadi lagi saat PK, di mana sebagian kegiatan diadakan di ruangan yang berada di lantai dua tanpa akses untuk kursi roda. LPDP sebelumnya telah memberikan dispensasi bagi Antony untuk tidak mengikuti PK mengingat keterbatasan yang dimilikinya. Namun, dia tak ingin mendapatkan perlakuan istimewa. Menurut Antony, PK adalah kesempatan belajar berharga yang tidak boleh dilewatkan. “Penyandang disabilitas memang memiliki kebutuhan khusus, tapi bukan berarti harus dikecualikan,” ujarnya.

Antony mendapatkan pengalaman sangat berharga karena bertemu dengan teman-teman yang luar biasa pada penyelenggaraan PK ke-22 oleh LPDP. Mereka dengan ikhlas dan bersemangat menggendong Antony di atas kursi roda sambil naik dan turun tangga sejak

hari pertama hingga penutupan PK. “Baru pertama kali dalam hidup, saya mengalami rasa persaudaraan yang sangat kuat di antara para *awardee* dari berbagai daerah dan etnis di seluruh Indonesia,” kata Antony.

#### Kebijakan disabilitas

Antony memiliki ketertarikan yang besar untuk mendalami *disability policy* atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan disabilitas. Apalagi hingga saat ini, dia masih menjadi bagian dari pemerintah, tepatnya sebagai aparatur sipil negara di Dinas Sosial Kota Padang. “Saya meneliti bagaimana potensi penganggaran pemerintah yang berpihak kepada penyandang disabilitas bisa membantu

merealisasikan pemenuhan hak-hak mereka dalam berbagai sektor, bukan lagi hanya dalam ranah rehabilitasi sosial,” tutur Antony. Potensi ini dikaji dari sisi pemerintah, organisasi disabilitas, dan masyarakat disabilitas itu sendiri.

Menurut Antony, sejak diratifikasinya United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities pada 2011 oleh pemerintah, arah *disability policy* di Indonesia dituntut untuk berubah. “Tepatnya perubahan perspektif dari sebelumnya penyandang disabilitas dianggap sebagai kelompok *charity based* menjadi *rights based*,” ujar Antony. Dengan demikian, penyandang disabilitas harus dilihat tidak lagi sebagai masyarakat pasif, tidak berdaya, dan harus selalu dibantu, tetapi sebagai warga negara aktif yang juga bisa berpartisipasi dalam pembangunan.

#### Dukungan kampus dan keluarga

Antony mengungkapkan bahwa *physical impairment* (kondisi fisik yang tidak bisa diperbaiki) bukanlah hambatan untuk menyelesaikan pendidikan. Keinginan kuat ditambah dukungan keluarga yang sangat besar menjadi kekuatan luar biasa untuk mengatasi hambatan dan tantangan apapun. “Apalagi di Australia, kondisi fisik saya tidak begitu menjadi penghalang karena ketersediaan *reasonable accommodation* berupa *assistive technology* dan aksesibilitas di berbagai fasilitas umum dan sarana transportasi untuk penyandang disabilitas,” katanya. Kedua pembimbing Antony juga berperan besar, bukan hanya membantu dalam sisi akademik, melainkan juga seluruh aspek yang dapat menunjang kelancaran studi.

Antony bersyukur karena keluarganya juga sangat suportif. “Istri dengan ikhlas dan tidak pernah lelah selalu mendampingi saya yang membutuhkan perawatan 24 jam,” ujarnya. Bahkan terkadang sang istri sampai tertidur di bawah meja kerja

Antony pada malam yang larut. “Begitu juga ayah dan ibu saya yang dengan sabar dan ikhlas harus berpisah sementara karena ayah ingin terus membantu istri mengurus saya, seperti menggendong dari dan ke kursi roda,” kata Antony menambahkan.

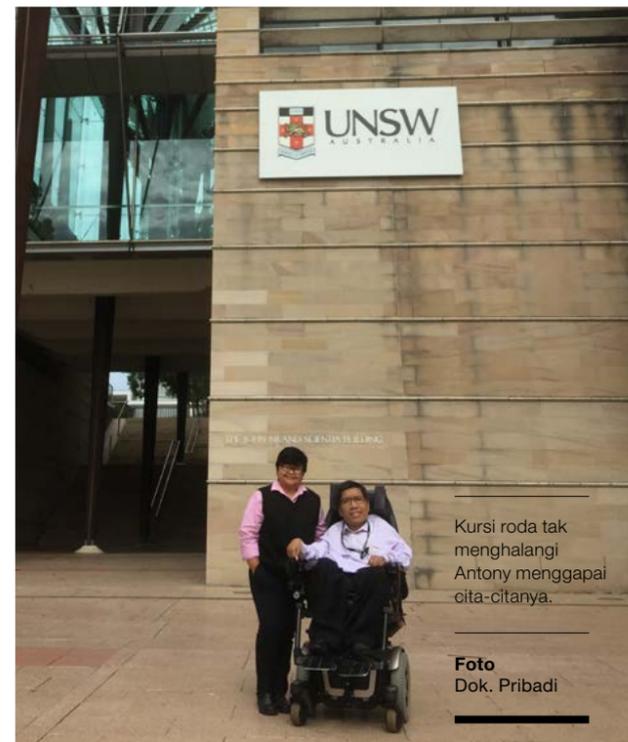
Di samping berkuliah, Antony aktif menjadi anggota tetap UNSW International Students Sub Committee for Equity, Diversity, and Inclusion. “Saya juga ditunjuk sebagai penanggung jawab program difabel untuk PPIA (Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia) Pusat,” ujarnya. Tahun lalu, organisasi itu membantu pemasaran produk kerajinan hasil karya penyandang difabel dari Sumatera Barat di Australia.

#### Harapan

Melalui perjuangannya mewujudkan cita-cita, Antony ingin menyampaikan pesan bahwa pendidikan dan pengetahuan menjadi modal penting bagi para penyandang disabilitas untuk bisa hidup mandiri. “Di samping itu, saya juga ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa penyandang disabilitas adalah kelompok yang berdaya dan mampu berkontribusi untuk keluarga, lingkungan sekitar, masyarakat, dan negara,” kata dia. Disabilitas, Antony menambahkan, tidak akan pernah menjadi penghalang selama seseorang memiliki keinginan kuat mewujudkan impian dan selalu berprasangka baik kepada Tuhan.

Di masa depan, Antony bercita-cita membangun *disability research centre* untuk ikut berkontribusi mengembangkan *disability studies* di dunia penelitian tanah air. “Saya berharap hasil riset sesudah selesai studi S3 nanti bisa menjadi salah satu referensi pemerintah dalam pengembangan *disability inclusive policy* yang semakin baik,” katanya menutup perbincangan.

Teks Dwinanda Ardhi



Kursi roda tak menghalangi Antony menggapai cita-citanya.

Foto  
Dok. Pribadi



Gedung A.A. Maramis II Lt. 2  
Jl. Lap. Banteng Timur No. 1 Jakarta 10710  
Telp/Faks. (021) 3846474  
E-mail. [lpdp@depkeu.go.id](mailto:lpdp@depkeu.go.id)  
Twitter/Instagram. @LPDP\_RI  
Facebook. LPDP Kementerian Keuangan RI  
Youtube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RI

# Menggagas *Sharing Economy* Antar-BLU

Teks Hari Kuncoro, Kepala Divisi Anggaran dan Akuntansi BDPKKS

**A**da yang istimewa dalam perhelatan “Satu Dekade Badan Layanan Umum (BLU)” yang diselenggarakan pada November 2016 lalu. Istimewa karena menghadirkan paparan dari pengusaha nasional Chaerul Tanjung tentang perubahan tren bisnis, terbitnya KMK Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset pada BLU, tantangan dari Panglima TNI untuk menjadi BLU terbaik, serta pesan dari Menteri Keuangan (Menkeu) agar BLU memuaskan publik.

Tren bisnis kini bergerak ke *sharing economy*. Dalam praktik bisnis ini, komunitas dapat memperoleh manfaat atas barang dan atau jasa dari pihak lain melalui pasar *online*. *Sharing economy* juga disebut *collaborative consumption* atau *peer economy*. Secara akademik istilah ini sering mengacu pada model pasar hibrid. Pemilik dan pengguna barang atau jasa dapat saling bertukar secara *online* dengan prinsip saling menguntungkan.

Salah satu bagian penting dari *sharing economy* adalah penggunaan teknologi untuk menyediakan informasi. Bila informasi tentang nilai suatu barang dan jasa dibagikan, maka nilai barang atau jasa tersebut akan meningkat, baik bagi individu, komunitas, atau masyarakat umum.

Di Indonesia, contoh *sharing economy* yang mudah dilihat adalah penggunaan Gojek dan Uber. Beberapa tahun lalu kita tidak pernah berpikir bahwa biaya transportasi kita “disubsidi” pihak lain. Fenomena hari ini membuktikan kebenaran sebuah adagium yang mengatakan bahwa kaya bukanlah dengan memiliki sesuatu tetapi menerima manfaat dari sesuatu.

Mengutip Chaerul Tanjung yang merujuk Olyver Wyman, kita telah memasuki revolusi industri keempat (industri 4.0). *Sharing economy* merupakan tren awal menuju *Internet of Things* (IoT) atau kolaborasi dari sistem fisik dan *cyber* yang saling terhubung secara *online*.

Bercermin dari fenomena tersebut, semua manajemen BLU harus mulai berpikir untuk mengoptimalkan aset yang dimiliki (*tangible, intangible, human resources*) melalui *sharing economy* antar BLU dengan mengoptimalkan internet.

## Aspek Hukum

Menkeu telah menerbitkan PMK Nomor 136 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset BLU sebagai landasan kebijakan dalam pelaksanaan *sharing economy*. Beberapa regulasi yang telah ditetapkan meliputi objek, mitra, bisnis model, perencanaan, kompensasi, jangka waktu, metode pemilihan mitra,

isi perjanjian, akuntansi, pengawasan dan pengendalian atas aset, SDM, dan manajemen BLU yang di-*sharing economy*-kan. Selain itu, Menkeu juga mengatur tentang aset mitra yang dapat dikerjasamakan oleh BLU.

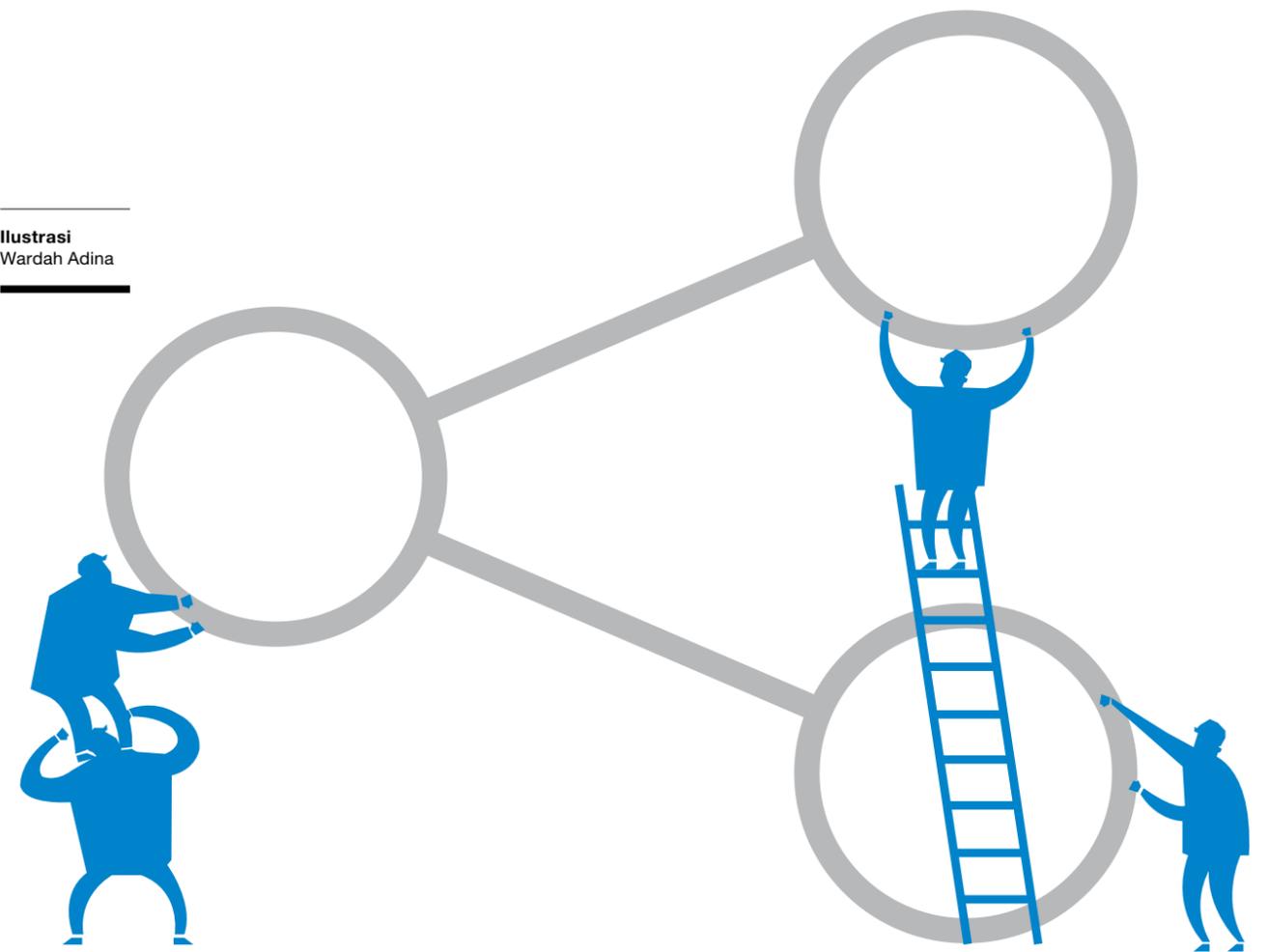
Dalam peraturan tersebut BLU dapat melakukan *sharing economy* atas obyek meliputi: tanah, gedung/bangunan, selain tanah dan bangunan, aset tak berwujud (perangkat lunak, lisensi, hasil kajian/penelitian, hak cipta, merk dagang, karya seni), sumber daya manusia, dan manajemen.

Adapun mitra BLU dalam melakukan *sharing economy* yaitu Pemerintah Daerah, BUMN/D, BLU/D, swasta, yayasan, koperasi dan perorangan. Bisnis model dalam peraturan tersebut dapat berbentuk kerjasama operasi untuk objek berupa tanah, gedung/bangunan, selain tanah dan bangunan dan aset tak berwujud, maupun kerjasama manajemen untuk objek berupa SDM dan manajemen. Menkeu memberi ruang fleksibilitas yang besar bagi manajemen BLU untuk berbisnis.

## Cara Kerja

Dengan memadukan tren dan regulasi yang ada, BLU memiliki banyak ruang untuk meningkatkan layanannya. BLU juga bisa mengefisienkan praktik bisnis serta memiliki akses informasi

Ilustrasi  
Wardah Adina



lain. Ruang tersebut misalnya informasi, teknologi/perangkat lunak, serta SDM dan manajemen.

Pertama, beberapa BLU memiliki informasi yang sangat bernilai bagi BLU lainnya. Contohnya, Pengelola Investasi Pemerintah (PIP). Sebagai BLU, PIP memiliki *data base* terkait bunga bank, imbal hasil saham, bunga obligasi, serta *data base* penilaian bank atau *issuer* obligasi/saham. Informasi ini dapat digunakan oleh BLU lain untuk melakukan investasi, seperti investasi *overnight* atau investasi jangka pendek lainnya. BLU yang memiliki bisnis inti yang sama juga dapat bertukar informasi atau menyusun *data base*. Misalnya tentang harga barang dan vendor terbaik bagi universitas atau rumah sakit.

Kedua, pemanfaatan teknologi dan perangkat lunak yang dapat dilakukan bersama oleh beberapa BLU sejenis.

Alternatif lain adalah mengkloning atau mengkustomisasi aplikasi yang sudah berjalan pada suatu BLU pada BLU lainnya. Dengan begitu, BLU yang belum memiliki aplikasi tidak perlu mengembangkan perangkat lunak dari nol. Misalnya saja aplikasi akuntansi, aplikasi daftar gaji dan SDM, sistem persediaan rumah sakit/universitas, pasien, kemahasiswaan dan lain-lain.

Ketiga, tingkat kematangan manajemen dan kompetensi SDM setiap BLU berbeda-beda. Kondisi ini membuka peluang terjadinya *sharing economy*. Di satu sisi, ada universitas atau rumah sakit yang sudah memiliki akuntansi biaya yang efisien dan ekonomis. Namun di sisi lain, ada yang baru mulai mengembangkannya. Akuntansi biaya ini berperan untuk menentukan penganggaran biaya, tarif layanan, sampai penghargaan ke pegawai.

Ada pula beberapa BLU yang memiliki SDM serta manajemen mumpuni dan ada pula yang sebaliknya. Misalnya pada bidang keuangan negara, manajemen gedung, dosen, atau dokter spesialis. Dengan *sharing economy* maka kesenjangan informasi, teknologi/perangkat lunak, serta manajemen dan SDM bisa teratasi.

Perpaduan peluang yang tercipta karena tren, ketersediaan regulasi, dan aset yang berjumlah besar hanya akan menciptakan kepuasan layanan apabila manajemen BLU memiliki sifat wirausaha dan keberanian menjadi juara. Adapun sifat-sifat wirausahawan yang wajib dimiliki oleh manajemen BLU menurut Chaerul Tanjung adalah inovatif, kreatif, bisa membaca dan menciptakan peluang, disiplin, detil, berorientasi pada hasil, dan perfeksionis.

# Cegah Kecurangan *Transfer Pricing*, Pemerintah Wajibkan Dokumen Tambahan

Riviu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya



Banyak cara dilakukan wajib pajak (WP) untuk menghindari kewajiban perpajakan (*tax avoidance*). Salah satunya melakukan transaksi tidak wajar dengan pihak terafiliasi. Dalam kondisi ideal, transaksi dengan pihak afiliasi seharusnya tidak berbeda dengan transaksi yang dilakukan antara para pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa, baik pada besaran harga maupun laba yang terjadi dalam transaksi, atau masih berada pada rentang harga dan rentang laba yang sama dengan transaksi yang terjadi antara pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa sebagai pembanding.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka tata kelola transaksi antarperusahaan terafiliasi, serta

untuk mengatasi permasalahan *tax avoidance*, ditetapkanlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya (PMK No. 213).

Peraturan yang berlaku efektif pada tanggal 30 Desember 2016 ini merupakan salah satu langkah reformasi

yang disiapkan oleh pemerintah. Melalui aturan tersebut, Kementerian Keuangan memperketat aturan mengenai *transfer pricing*. Diantaranya mewajibkan perusahaan terafiliasi, dengan omzet tertentu, untuk menyampaikan dokumen penentuan harga transfer sebagai dasar penentuan penerapan prinsip kewajaran atau kelaziman usaha dalam penentuan harga transfer.

Dokumen Penentuan Harga Transfer Kementerian Keuangan mewajibkan perusahaan terafiliasi yang saling melakukan transaksi untuk menyiapkan beberapa dokumen laporan sebagai penentu harga transfer. Dokumen tersebut meliputi dokumen induk (*master file*), dokumen lokal (*local file*), dan laporan per negara (*country by country report* atau CbCR).

Dokumen induk dan dokumen lokal diwajibkan untuk WP yang melakukan transaksi afiliasi dengan nilai peredaran bruto tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak lebih dari Rp50 miliar, atau lebih dari Rp20 miliar untuk transaksi barang, atau lebih dari Rp5 miliar untuk barang tak berwujud maupun transaksi afiliasi lainnya. Kewajiban juga disyaratkan untuk transaksi dengan pihak afiliasi yang berada di negara yang tarif PPh-nya lebih rendah dari tarif PPh di Indonesia.

Kewajiban penyampaian dokumen induk dan dokumen lokal harus tersedia paling lama empat bulan setelah akhir tahun pajak. Kedua dokumen dimaksud wajib dibuat ikhtisar dan dilampirkan saat penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) badan.

## Laporan per Negara

Di samping menyampaikan dokumen induk dan dokumen lokal, terdapat kewajiban untuk menyampaikan laporan per negara. Laporan ini perlu

disampaikan WP atau perusahaan dalam negeri yang berkedudukan sebagai anggota grup usaha dan entitas induk dari grup usaha dengan peredaran bruto konsolidasi pada tahun pajak paling sedikit Rp11 triliun. Informasi dalam laporan per negara digunakan dalam rangka penilaian risiko penghindaran pajak. Untuk itu, laporan tersebut harus memuat dua informasi besar.

Pertama, informasi terkait alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha per negara atau yurisdiksi dari seluruh anggota grup usaha, baik di dalam maupun luar negeri. Kedua, daftar anggota grup usaha dan kegiatan usaha utama per negara atau yurisdiksi. Informasi mencakup nama negara atau yurisdiksi, peredaran bruto, laba atau rugi sebelum pajak, PPh yang telah dipotong/dipungut/dibayar sendiri, PPh terutang, modal, akumulasi laba ditahan, jumlah pegawai tetap, dan harta berwujud selain kas dan setara kas.

Laporan ini wajib disampaikan sepanjang negara atau yurisdiksi tempat entitas induk berdomisili tidak mewajibkan penyampaian laporan per negara, tidak memiliki perjanjian dengan pemerintah Indonesia mengenai pertukaran informasi perpajakan, atau memiliki perjanjian pertukaran informasi perpajakan tapi laporan per negara tidak dapat diperoleh dari negara atau yurisdiksi tersebut. Selanjutnya, laporan per negara harus tersedia paling lama 12 bulan setelah akhir tahun pajak dan disampaikan sebagai lampiran SPT tahunan PPh badan untuk tahun pajak 2016 dan seterusnya.

## Pengawasan WP

Untuk keperluan pengawasan kepatuhan WP, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan (bukper), atau penyidikan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya berwenang

meminta dokumen induk dan dokumen lokal. Kedua dokumen tersebut juga diperuntukkan dalam melakukan proses penelitian keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang tidak benar, atau pembetulan. WP wajib menyampaikan dokumen penentuan harga transfer dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jika penyampaian dokumen melebihi jangka waktu, maka dokumen yang disampaikan tidak dipertimbangkan sebagai dokumen penentuan harga transfer.

## Penutup

Pelaporan per negara merupakan salah satu bagian dari rekomendasi proyek anti *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). Selain itu, terdapat pula kewajiban untuk melakukan konvergensi regulasi domestik dalam mengakomodasi tiga dari empat BEPS Minimum Standards lainnya, yakni praktik berbahaya dalam pajak (*harmful tax practices*), penyalahgunaan perjanjian pajak (*tax treaty abuse*), dan penyelesaian sengketa (*dispute resolution*).

Melalui ketentuan penyampaian dokumen *transfer pricing*, perusahaan diwajibkan menyampaikan nilai transaksi yang terjadi antarperusahaan afiliasi mereka dengan nilai wajar. Dengan demikian, saat dilakukan pemeriksaan, WP atau perusahaan bisa membuktikan dan menjelaskan kepada DJP terkait kesesuaian nilai transaksi yang dibayarkan dengan yang seharusnya. Pengetatan aturan ini sejalan dengan spirit masyarakat internasional untuk melaksanakan transparansi dan keterbukaan informasi.

Teks Budi Sulistyono

# Suka Duka dari Kandang Ayam

Menurut penelitian, pegawai yang memiliki hobi dapat terhindar dari stres. Seperti yang dilakoni Ferry Hidayat, ia memilih beternak ayam untuk mengisi waktu luangnya di akhir pekan.

“Jika mau berbisnis, jangan ditunda-tunda, harus dengan modal nekat,” begitulah kira-kira ungkapan salah satu rekan Ferry, sapaan akrabnya. Ferry yang saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Serpong ini memiliki kegemaran yang unik, yaitu memelihara ayam. Bukan hanya memelihara ayam biasa, pria yang telah dikarunia tiga anak ini pun dikenal sebagai peternak ayam yang cukup sukses. Kesuksesan yang dicapai bermodal ketekatan dan kecintaannya terhadap ayam.

Awal mula ketertarikan pada bisnis ayam dimulai saat ia ditugaskan di KPKNL Pangkalpinang pada tahun 2012. Kala itu, Ferry mengunjungi kebun seorang teman yang ditanami berbagai buah-buahan. Asrinya suasana kebun ditambah dengan suara gemericik sungai kecil membuat Ferry teringat akan masa kecilnya. Layaknya sebagian besar anak kecil di pertengahan tahun 1980-an, masa kecil Ferry dihabiskan dengan mencari ikan di sungai dan memelihara ayam. Maka, saat mendengar ada sebidang tanah yang dijual beserta kandang ayamnya di Pangkalpinang, Ferry pun tidak berpikir lama. Ia membeli tanah tersebut dengan harga yang cukup murah.

## Belajar beternak ayam

Langkah pertama yang dilakukan Ferry untuk memulai usaha beternak ayam yaitu membeli *day old chick* atau DOC (anak ayam berusia satu hari). Tanpa menunggu lama, Ferry segera membeli 1000 DOC beserta perlengkapan beternak lainnya. “Saya sering dengar, kalau berbisnis itu harus langsung eksekusi, jangan terlalu banyak pikiran,” ujar pria kelahiran Jakarta ini sembari tertawa. Ferry memulai usahanya berbekal kecintaan terhadap ayam. Ia banyak belajar cara mengurus ayam, mulai merawat hingga memberi makan, dari buku dan teman-temannya.

Dengan mempekerjakan satu orang asisten, Ferry sangat menikmati hobi barunya ini. Akhir pekan selalu ia habiskan dengan mengurus ayam-ayamnya. Setelah cukup umur, ayam broiler tersebut dijual kepada pengepul. “Saya belum sanggup kalau menjual ayam secara langsung ke pedagang pasar tradisional. Mereka pasti butuh ratusan pasokan ayam tiap hari,” tuturnya. Kesuksesan Ferry untuk menjalani usaha ini tak lepas dari dukungan penuh keluarga. “Istri sangat mendukung penuh, tapi anak-anak suka protes dengan bau kotoran ayam yang sangat menyengat,” kata ayah dari Oryza Febrizard Hidayat, Rahma



Ferry memulai beternak ayam dari nol

Foto Dok. Pribadi

Camelia Jasmine, dan Muhammad Keynes Hidayat ini.

Dua tahun mengabdikan di Pangkalpinang, Ferry mendapat penempatan baru di KPKNL Serpong. Sebagai pegawai negeri sipil, tentu ia harus siap mengabdikan ke seluruh wilayah di Indonesia. Namun kepindahannya ke Serpong membawa sedikit kesedihan karena harus berpisah dengan ribuan ayam-ayam yang telah diternakannya. Dengan memboyong seluruh keluarga, Ferry pun kembali ke Jakarta, tempat kelahirannya. Beberapa waktu setelah itu, ia menjual kebun di Pangkalpinang, kemudian membeli sebidang kebun dan rumah di Ciomas, Bogor. Di situlah Ferry memulai kehidupan baru sebagai orang Bogor.

## Melirik ayam hias

Di Kota Hujan tersebut, Ferry menyadari, beternak ayam *broiler* tidaklah semudah seperti di Pangkalpinang. Sempat ia mencoba usaha ayam kampung selama tiga bulan. Lalu ia melirik usaha jenis lain, yaitu ayam hias. Mulanya, Ferry tertarik dengan keunikan fisik ayam hias. “Ayam hias yang saya beli pertama kali adalah ayam Poland. Unik sekali, rambutnya gondrong menutupi mata,” ujarnya sembari menunjukkan jenis-jenis ayam hias dengan penuh antusias.

Kini, lulusan SMA 1 Depok tahun 1993 ini lebih sering bergelut dengan ayam hias. Bersama sejumlah rekan, ia membentuk grup Lelang Ayam di media sosial facebook. Berbekal ilmu sebagai pejabat lelang, Ferry pun menyempurnakan aturan dan mekanisme jual beli di grup lelang tersebut. Siapa sangka, peminat lelang ayam sangat banyak. Hingga tulisan ini disusun, grup lelang ayam tersebut berjumlah 7.435 anggota. Dalam grup lelang, tidak hanya ayam hias yang diperjual belikan, namun juga ayam jenis lain yang laris dicari masyarakat, seperti ayam cemani dan ayam hutan hijau.



Foto Anas Nur Huda

Layaknya pengusaha lainnya, Ferry pun mengalami untung rugi dalam berwirausaha. “Tujuan saya beternak ayam ini bukan semata mencari untung. Saya hanya ingin belajar cara beternak, ilmunya bisa saya aplikasikan nanti buat bekal pensiun,” ujarnya sembari tersenyum. Setelah terjun sebagai peternak ayam, Ferry memahami bahwa untung dan rugi adalah hal yang biasa. “Dari tujuh kali untung, ada lima kali rugi. Itu sudah rumus peternak ayam,” candanya.

“Kalau mau berbisnis dengan makhluk hidup itu nggak boleh posesif, nggak boleh baper (bawa perasaan),” tambahnya dengan tergelak. Ferry lalu menceritakan saat ia merawat DOC. Bayi ayam tersebut berusaha dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya, setiap hari diberi makanan yang tepat, namun pada akhirnya ayam tersebut mati.

## Belajar lelang di Negeri Kincir Angin

Sebagai pejabat lelang, tahun 2011, Ferry terpilih menjadi salah satu peserta diklat penerimaan negara melalui lelang di VU University Amsterdam selama 26 hari. Tak berselang lama setelah dari Amsterdam, Ferry mendapat promosi sebagai Kepala Seksi Pelayanan Lelang di KPKNL Pangkalpinang, kemudian pada 2014

ditempatkan di KPKNL Serpong hingga saat ini.

Ada satu kisah unik saat Ferry pertama kali ditugaskan di KPKNL Sorong pada tahun 1996. Saat itu, Ferry yang masih *fresh graduated* membawa cukup banyak barang untuk dibawa ke Sorong. Anak kedua dari lima bersaudara ini membayangkan akan tinggal di Honai, rumah tradisional Papua yang terbuat dari jerami, serta jauh dari riuh perkotaan. Saat tiba di Sorong, betapa kagetnya Ferry melihat Sorong adalah kota yang telah berkembang, tak jauh beda dengan tempat tinggalnya di Depok.

Dalam awal masa kariernya, Ferry merasa bersyukur bertemu dengan salah satu atasan bernama Tuslan di KPKNL Sorong. Tuslan merupakan tipikal atasan yang egaliter, semua orang di kantor dipanggil dengan sebutan bapak atau ibu, bahkan termasuk *office boy* dan anak buahnya. Sikap Tuslan membuka mata Ferry untuk menghormati orang lain dan menganggap kedudukan orang lain sama sebagai manusia. “Jabatan jangan menghalangi kita untuk memandang orang lain sebagai manusia. Sebagai manusia, kita sama,” ujarnya menutup pembicaraan dengan Media Keuangan.

Teks Pradany Hayyu

## Membangun Kepercayaan Diri Buah Hati



Foto  
Anas Nur Huda

**L**ibur sekolah baru saja usai. Anak-anak kembali menjalani rutinitasnya di sekolah. Mengamati hal ini, ada fenomena menarik untuk kita renungkan bersama. Ya, momen pembagian nilai rapor anak. Mengapa menarik? Sebab, perkara ini tidak semata menjadi tanggung jawab buah hati. Ada andil orang tua di dalamnya.

Merupakan hal yang lumrah, saat ayah dan bunda menunjukkan respons kecewa manakala capaian nilai rapor anak tidak sesuai dengan harapan. Namun, tanpa kita sadari respons negatif bisa menjadi masalah baru bagi anak. Sebab di sisi lain, anak-anak membutuhkan umpan yang mampu membangkitkan semangat mereka.

Dewasa ini, anak-anak dihadapkan pada era yang membutuhkan pribadi-pribadi tangguh. Pribadi yang siap menghadapi beragam tantangan dan mampu berkompetisi. Tidak dapat dipungkiri, anak-anak berprestasi boleh jadi memiliki rasa percaya diri yang lebih.

Hal ini bisa menjadi langkah awal yang menentukan langkah-langkah berikutnya di masa mendatang. Di sinilah peran orangtua dalam memotivasi anak menjadi hal yang perlu diperhatikan.

Terkait hal tersebut, ada beberapa hal yang sering kali luput dalam perhatian orangtua. Pertama, memotivasi tidak sama dengan memaksa. Dalam memotivasi, orang tua perlu memberikan teladan. Terlebih, orang tua adalah pribadi terdekat bagi anak, sehingga kesan yang diterima anak bisa lebih sering dan lebih dalam dirasa. Kedua, penanaman ilmu pengetahuan kepada anak perlu diiringi dengan pendidikan norma. Sebab pada momen inilah, pondasi karakter anak mulai dibangun. Ketiga, anak perlu diberikan stimulus untuk senang berkompetisi, tapi bukan berambisi. Dengan demikian, mereka siap menghadapi kegagalan.

Jika boleh menganalogikan dengan kertas putih, maka anak-anak punya banyak potensi. Para orang tua memiliki kesempatan pertama untuk

menorehkan beragam warna indah dan hal-hal bermanfaat di sana. Salah satunya membantu tergalinya potensi anak di masa-masa awal pertumbuhannya. Termasuk memberikan pemahaman tentang siapa dirinya, apa kelebihan dan kekurangannya, serta membantu menemukan gambaran mengenai peran yang bisa diambil anak dengan baik dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, biarkan mereka berproses.

Hasil akhir adalah ujung dari sebuah proses. Bagaimanapun kelak hasil akhirnya, yang jelas orang tua ada dan hadir membersamai proses tersebut. Berada di sisi anak saat jatuh dan bangun mereka. Penghargaan dan motivasi selalu siap diberikan, sehingga hadir ikatan batin yang kuat di antara keduanya. Anak-anak bisa lebih percaya diri dan bersemangat mengejar prestasi melalui pendampingan kita sebagai orang tua. Sebab umpan terbaik, tentu lebih bisa memberikan hasil terbaik. Begitupun dengan mereka.

Teks Titi Susanti



Foto  
Internet

## La La Land: Reinkarnasi Musikal Modern

**J**arang-jarang film musikal diputar di bioskop Indonesia. Setelah memecahkan rekor dengan memenangkan 7 piala Golden Globe pada perhelatan 8 Januari lalu, “La La Land” menjadi buah bibir di kalangan penikmat film. Sebagian besar dari mereka memuji film karya sutradara Damien Chazelle ini berkat keceriaan dan kebahagiaan yang ia tularkan melalui nyanyian dan tarian, sementara sebagian yang lain terbius oleh romansa dan *chemistry* kedua tokoh utamanya. Yang pasti, tak sedikit dari penonton yang menobatkannya sebagai film terbaik yang membuka tahun 2017. Apa yang membuatnya begitu disukai?

Sejatinya, “La La Land” adalah kisah tentang mengejar cita-cita. Kedua tokoh utamanya adalah Sebastian (diperankan oleh Ryan Gosling), seorang pianis jazz yang sepi job, dan Mia (diperankan dengan sangat gemilang oleh Emma Stone), seorang bartender sebuah kedai

kopi yang berkali-kali gagal *casting*. Suatu waktu, mereka bertemu tanpa sengaja dan—singkat cerita—cinta pun bersemi di antara mereka. Dalam jatuh-bangun kerasnya dunia hiburan Hollywood masa kini, keduanya merajut mimpi: Sebastian bercita-cita memiliki kafe bertema jazz, dan Mia—tentu saja—bercita-cita menjadi aktris sukses di Hollywood.

Dari segi cerita, saya kira “La La Land” bukanlah pencapaian yang tanpa noda. Plotnya sangat sederhana (bahkan mudah diprediksi), karakterisasi kedua tokoh utamanya terbilang dangkal, dan gaya penceritaannya tidak konsisten dari awal hingga akhir. Namun, eksekusi yang meriah dengan mengambil inspirasi film musikal klasik Hollywood (sebut saja film “Singin’ in the Rain” atau—terutama—“The Umbrellas of Cherbourg” karya Jacques Demy) menyulap “La La Land” menjadi layaknya tonggak reinkarnasi *genre* musikal di masa modern. Warna-warni kostum, kamera *fisheye* yang membuat

panorama melengkung, hingga gegap-gempita kembang api dalam “La La Land” menyemarakkan nyanyian dan tarian yang saya kira akan membuat Anda tak kuasa untuk tidak sekadar menjentikkan jari atau mengetuk-ngetuk kaki mengikuti irama.

Tetapi, kembali lagi, sebagai kisah tentang pengejaran cita-cita, “La La Land” barangkali mampu menjadi instrumen eskapisme dari rutinitas Anda yang padat. Ia memberi semangat untuk menumbuhkan *passion* dalam pekerjaan Anda, menjadikan kesibukan Anda sebagai alat untuk memaksimalkan hidup. Perjalanan Sebastian dan Mia mencari penghidupan di Hollywood, diselingi kisah asmara di antara mereka, niscaya akan menjadi semacam alarm bagi Anda: bahwa hidup terlalu singkat untuk tidak menjalani hidup dengan sepenuhnya.

Peresensi Akbar Saputra



## Menikmati Kedamaian di Tangkahan

**K**icau burung yang bersahutan dengan suara monyet, serangga, dan hewan hutan lainnya membangunkan saya dari tidur pada sebuah pagi di awal Desember tahun lalu. Ketika jendela kamar penginapan dibuka, sinar matahari menyuarak. Udara segar dan bersih segera memenuhi paru-paru. Sejenak melupakan segala rutinitas sembari menikmati kedamaian alam di Taman Nasional Tangkahan terasa seperti sebuah kemewahan.

Tanpa sinyal telepon selular dan televisi, saya dan Jodie—yang

mengabadikan perjalanan ini dalam gambar-gambar ciamik—seperti terputus dari dunia luar. Alih-alih menggunakan pendingin ruangan, kamar penginapan kami memiliki kelambu untuk menghalangi nyamuk masuk. Air sungai yang bening, vegetasi hijau, sekawanan gajah, beserta para pawangnya (*mahout*) yang hidup berdampingan menjadi daya tarik yang sungguh memikat.

Untuk menjangkau Tangkahan, kami mesti menempuh perjalanan darat selama empat jam dari Medan. Mobil yang kami tumpangi melewati Kabupaten Binjai dan Langkat, serta keluar masuk perkebunan

kelapa sawit. Banyak jalan yang belum beraspal, sehingga kendaraan kami berguncang berkali-kali. Perjalanan yang cukup melelahkan itu terbayar begitu kami tiba di tujuan.

Tangkahan merupakan salah satu contoh kawasan ekoturisme paling berhasil di Indonesia. Di sana, kita bisa melihat bagaimana penduduk lokal, yang sebagian di antaranya pernah menjadi bagian dari kegiatan *illegal logging*, bertransformasi menjadi perawat hutan dan gajah.

Pemandu sekaligus pemilik penginapan kami, Firnando, menjelaskan

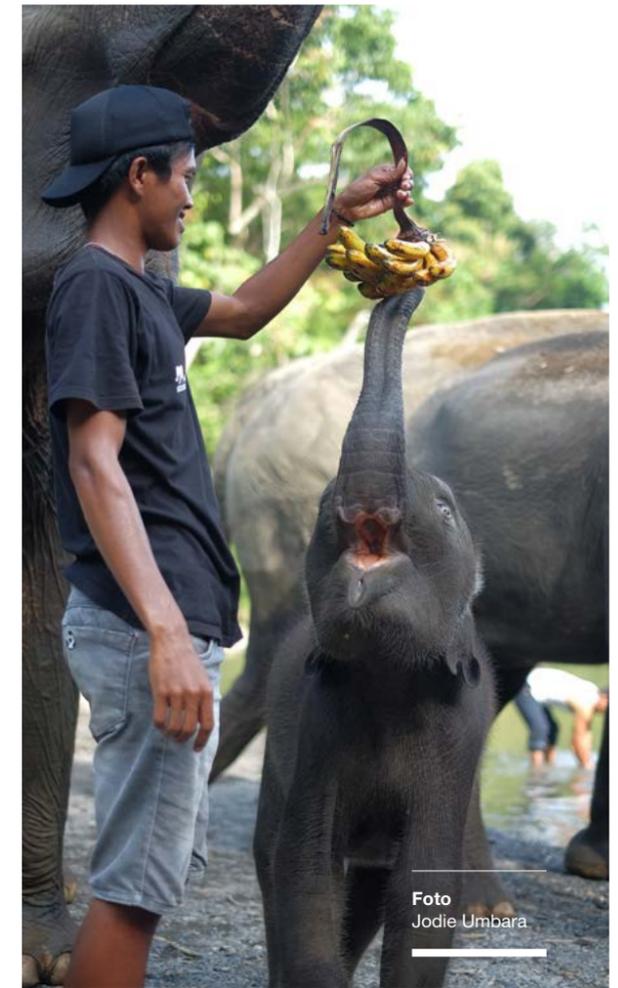


Foto  
Jodie Umbara

bahwa saat ini ada sepuluh ekor gajah di Tangkahan. Setiap gajah dirawat oleh dua orang *mahout*. Gajah tertua adalah betina berusia 50 tahun, sedangkan yang paling muda adalah anak gajah jantan berusia 13 bulan. Upaya pelestarian gajah di Tangkahan membawa harapan setelah tiga anak gajah berhasil dilahirkan dari program pembuahan *in situ*.

### Memandikan gajah

Seperti manusia, gajah-gajah di Tangkahan mandi sehari dua kali. Memandikan gajah menjadi pengalaman yang mengesankan. Sebelum dimandikan, gajah-gajah itu akan dibiarkan makan di sisi seberang sungai. Setengah jam kemudian, mereka digiring ke lokasi

buang air. Hal ini penting agar kotoran gajah tidak terbawa aliran sungai yang masih digunakan juga oleh penduduk lokal di kawasan hilir untuk mandi dan mencuci.

“Hati-hati Mas, Sari bisa tiba-tiba bangun jika mendengar suara anaknya menjerit,” kata seorang *mahout* menyebut nama seekor induk yang sedang saya mandikan. Sementara gajah-gajah dewasa asyik berendam, tiga ekor anak gajah yang lucu memang cenderung lebih suka berlarian dan bermain. Jika disodori pisang, mereka akan menjulurkan belalainya dan mengikuti kemana pun *mahout* berjalan.

Seusai mandi, gajah akan makan lagi. Dalam satu hari, seekor gajah dewasa

di Tangkahan bisa memakan 35 dahan pelepah sawit. Mamalia besar itu juga diberi jagung atau bubur jagung yang ditambah gula. Pengunjung bisa turut serta memberi makan dan berfoto bersama.

Untuk memandikan gajah, pengunjung hanya perlu membayar Rp150 ribu per orang. Anda bisa menganggapnya sebagai upaya untuk turut berkontribusi terhadap pelestarian hewan langka ini. Di samping memandikan gajah, kita juga bisa menikmati arung jeram dan *trekking* di hutan. Untuk mencoba arung jeram, Anda perlu membayar Rp500 ribu, sedangkan untuk *trekking* dikenakan tarif Rp 1 juta.

Teks Dwinanda Ardhi



## Konsep ZAPFIN bagi PNS

Wanita yang telah menjadi investor Reksa Dana sejak usia 16 tahun ini berbagi tips bagi PNS untuk mengatur penghasilan tiap bulannya dengan konsep ZAPFIN. Pertama, Zakat merupakan bentuk pengeluaran wajib atau sedekah. Kedua, Assurance dikeluarkan untuk premi asuransi dan dana darurat. Ketiga, *Present Consumption* untuk pengeluaran rutin bulanan. Keempat, *Future Spending* berupa tabungan untuk kebutuhan tahun ini. Kelima, *Investment* atau investasi untuk masa depan yang sifatnya jangka panjang.

Bagi Prita, bila seorang PNS terlanjur memiliki utang dengan jaminan SK Pengangkatan, sebaiknya ia mengevaluasi penggunaan dana dari pinjaman tersebut. "Utang yang baik digunakan untuk membeli rumah tinggal maupun kendaraan operasional utama pertama. Apabila utang digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga maupun biaya pendidikan anak, artinya ia hidup di atas kemampuan finansialnya. Solusinya ialah menurunkan standar biaya hidup dalam jangka panjang dan menjual aset yang dimiliki untuk melunasi utang dan mengambil SK yang diagunkan," jelasnya.

Untuk keperluan jaminan kesehatan, CEO dan Chief Planner di kantor konsultan keuangan ZAP Finance ini mengatakan bahwa tambahan asuransi selain BPJS tergantung pada kondisi keluarga setiap PNS. Jika tidak ada faktor risiko penyakit khusus, maka asuransi tambahan dengan biaya pribadi belum menjadi prioritas. Sebaliknya, jika membutuhkan layanan fasilitas kesehatan yang lebih tinggi, maka askes pribadi dapat diambil. "Pastikan premi askes mampu dibayarkan dari penghasilan. Idealnya, maksimal 5 persen dari penghasilan tetap bulanan."

Terkait investasi, lanjut Prita, seorang PNS dapat memilih investasi berdasarkan tujuan Keuangan, profil risiko, dan jumlah dana yang dimiliki. "Pilihan yang umumnya dapat digunakan contohnya produk reksa dana karena dapat dibeli dengan dana minimal Rp100 ribu. Namun bila memiliki dana lebih besar, maka alternatif lainnya dapat memilih opsi properti," katanya.

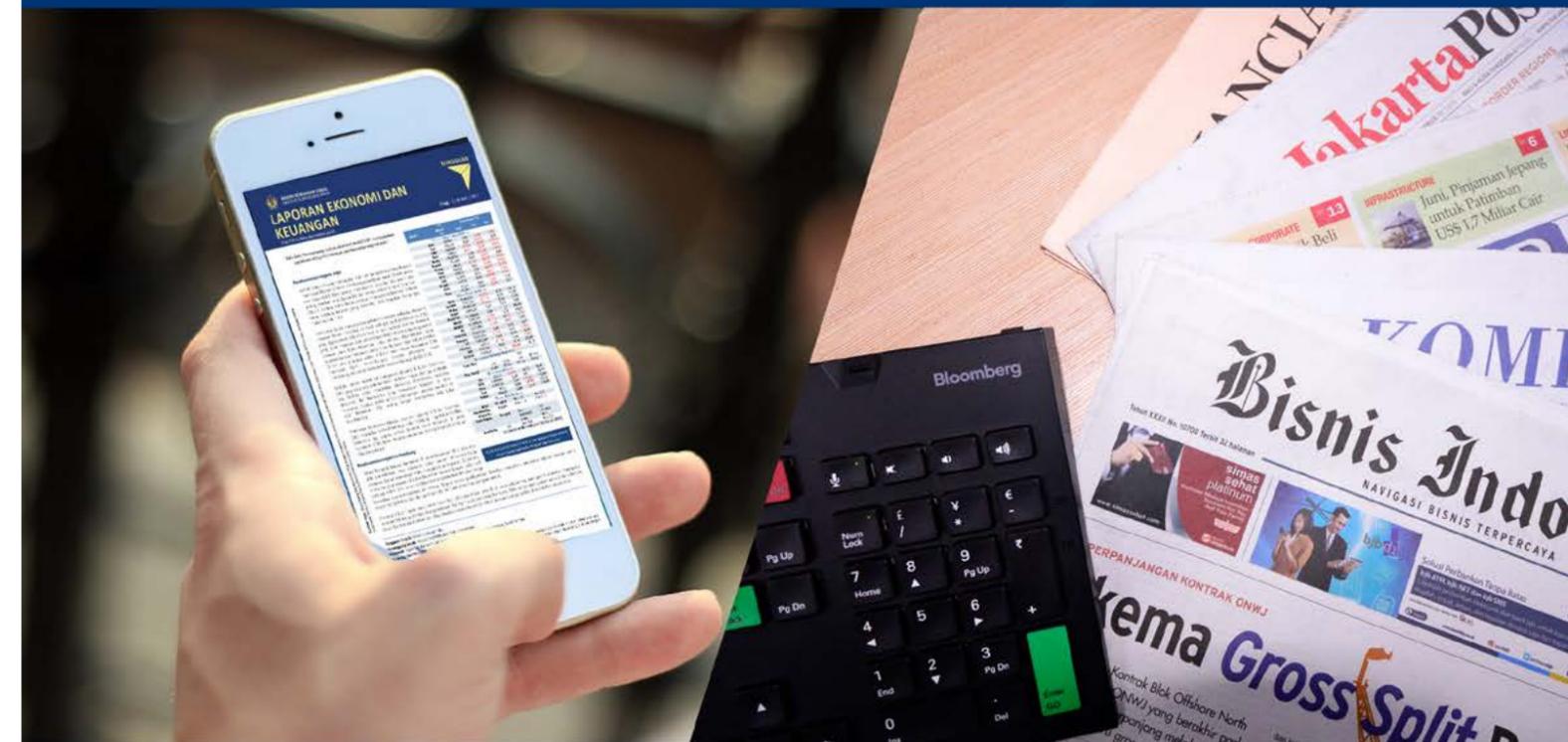
Teks lin Kurniati

**D**i mata Prita Hapsari Ghozie, pakar *financial planner*, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dan bekerja untuk institusi pemerintahan harus taat pada aturan yang berlaku. Dengan penghitungan pendapatan berdasarkan kinerja, maka penghasilan yang tidak tetap setiap bulan bisa menjadi tantangan tersendiri bagi para PNS.

Menurut anak pertama pasangan Iwan Pontjowinoto dan Roswita Januarti, setiap PNS baik *single* maupun sudah berkeluarga dapat membagi pos pengeluarannya berdasarkan jenis penghasilan. Untuk pengeluaran rutin, didanai oleh penghasilan bulanan yang sifatnya tetap, seperti makan, transportasi, pembayaran listrik/air, biaya sekolah dan lainnya. Sementara untuk penghasilan bulanan yang sifatnya tidak tetap, maka sebaiknya digunakan untuk pengeluaran tidak rutin, seperti hiburan, keperluan pribadi, sumbangan, dan lainnya.



## BERITA DALAM GENGGMAN



Ikuti update perkembangan ekonomi & pasar keuangan baik domestik maupun global secara mudah melalui

**DAILY NEWS & WEEKLY REPORT**

dengan mengakses

[www.fiskal.kemenkeu.go.id](http://www.fiskal.kemenkeu.go.id)

**Daily news** : update berita terkini dan perkembangan pasar keuangan harian

**Weekly report** : update perkembangan perekonomian global dan domestik mingguan



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



**CERDASKAN BANGSA,  
SELAMAT HARI PERS**